

Analisis Gender tentang Ekstremisme Kekerasan dan Dampak COVID-19 terhadap Perdamaian dan Keamanan di ASEAN:

PENELITIAN BERBASIS BUKTI
UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN



TENTANG LAPORAN INI

Laporan ini merupakan hasil kerja sama dan kemitraan antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Indonesia, dan Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women). Penelitian ini dilaksanakan atas penugasan dari UN Women dan merupakan bagian dari proyek regional *Pemberdayaan Perempuan untuk Perdamaian Berkelanjutan: Mencegah Kekerasan dan Mempromosikan Kohesi Sosial di ASEAN* dengan dukungan penuh dari Global Affairs Canada dan Republik Korea. Penelitian ini dilakukan oleh Monash Gender, Peace and Security Center di Monash University. Penelitian ini juga didukung oleh informasi yang disediakan oleh kelompok multi-stakeholder, termasuk pemerintah dan masyarakat sipil dari kawasan ASEAN. Temuan penelitian ini bertujuan untuk mendukung implementasi ASEAN Bali Work Plan 2019-2025 yang dikembangkan untuk mengoperasionalkan *ASEAN Regional Prevention of Violent Extremism Plan of Action*.

Pandangan yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah pandangan penulis dan tidak mewakili pandangan dan kebijakan resmi UN Women, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi afiliasinya, atau Pemerintah Kanada atau Republik Korea. Desain dan presentasi materi dalam publikasi ini tidak menyiratkan ekspresi pendapat apa pun dari pihak UN Women terkait status hukum negara, wilayah, kota atau wilayah mana pun atau otoritasnya, atau mengenai penetapan batas atau garis depan wilayah. Apabila menemukan kesalahan atau ketidaktelitian, Anda dapat mengunjungi situs web kami.

UCAPAN TERIMA KASIH

UN Women mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kanada dan Republik Korea atas kontribusi besar mereka untuk mendukung agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di kawasan ASEAN dan secara khusus untuk melakukan dan mempublikasikan penelitian ini.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim peneliti dari Monash Gender, Peace and Security Center di Monash University, Mark Harris (UN DPPA-DPO), Hernan Logo (UNOCT) dan Avezia Ariane dan Timothy Wilson (UNODC) atas kemitraan dan dukungan mereka.

Tim Penulis laporan: Alexandra Phelan, Irine Hiraswari Gayatri, Jacqui True, Amporn Marddent, Yolanda Riveros-Morales dan Sitte Janine Gamao

Bimbingan strategis dan kontribusi substantif: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP PA), Ketua ASEAN Committee on Women (ACW), Kantor Penasihat Presiden Filipina untuk Proses Perdamaian (OPAPP), Lembaga Internasional tentang Pemikiran dan Peradaban Islami Malaysia, Pembela Hak Asasi Manusia Thailand, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC), Jamshed Kazi, Norul Mohamed Rashid, Ryce Chanchai, Cristina Fernandez Escorza, Hosianna Anggreni, Vu Thu Hong, Xinyue Gu, dan Yoomi Jun (UN Women).



DAFTAR ISI

Daftar Tabel dan Gambar	04
Daftar Singkatan	05
Ringkasan Eksekutif	06
Pendahuluan	13
Kerangka kebijakan yang ada di kawasan ASEAN	17
Metodologi	27
Hasil	
• Konten intoleran yang disebarkan secara online	31
• Efek dari konten online yang tidak toleran di ruang offline	34
• Rekrutmen berdasarkan gender	41
• Perselisihan dan penolakan	44
• Kebijakan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang ada	46
Kepemimpinan kolektif dalam Perumusan dan Pelaksanaan RAN PE: Studi Kasus Indonesia dan Pembelajaran untuk ASEAN	51
Rekomendasi	55
Kesimpulan	61
Catatan Akhir	62

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1:	28
Usia menurut jenis kelamin responden	
Gambar 2:	28
Survei responden tentang platform media sosial yang paling disukai	
Gambar 3:	33
Frekuensi responden melihat media sosial ekstremis yang mendorong kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan	
Gambar 4:	34
Responden yang pernah melihat konten intoleran yang mendorong kekerasan terhadap kelompok tertentu di media sosial	
Gambar 5:	34
Pentingnya wali laki-laki mendampingi perempuan saat bepergian ke daerah konflik	
Gambar 6:	37
Pandangan responden terhadap pernyataan, “Saya prihatin bahwa kelompok ekstremis kekerasan mendukung kepercayaan yang mendorong permusuhan dan kebencian terhadap perempuan.”	
Gambar 7:	39
Pandangan responden terhadap pernyataan, “Saya khawatir kepercayaan yang mendorong permusuhan dan kebencian yang dianut oleh kelompok ekstremis berujung pada kekerasan terhadap perempuan.”	
Gambar 8:	40
Pandangan responden terhadap pernyataan, “Radikalisasi online dan proliferasi propaganda ekstremis telah meningkat selama COVID-19.”	
Gambar 9:	41
Pandangan responden terhadap pernyataan “COVID-19 telah mengakibatkan ketidakamanan yang lebih besar bagi perempuan yang terkena dampak ekstremisme kekerasan.”	

DAFTAR SINGKATAN

AMMTC	Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN untuk Penanggulangan Kejahatan Transnasional
ASEAN	Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara
ASG	Kelompok Abu Sayyaf
BNPT	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
CT	Kontraterorisme
FKPT	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (<i>Terrorism Prevention Coordinating Forum</i>)
GPS	Gender, Perdamaian dan Keamanan
Komunitas LGBTI	Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Interseks
IPAC	Institut Analisis Kebijakan Konflik
ISIS	Negara Islam Irak dan Suriah
JI	Jamaah Islamiyah
KPP PA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RAN	Rencana Aksi Nasional
RAKDMN	Rencana Aksi Nasional tentang Kejahatan Siber
P/CVE	Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan
RAN PE	Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan
SOMTC	Pertemuan Pejabat Senior Negara-negara ASEAN tentang Kejahatan Lintas Batas Negara
SSR	Reformasi Sektor Keamanan
UNDP	United Nations Development Programme
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
UNSCR	Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
VE	Ekstremisme Kekerasan
WGWC	Kelompok Kerja untuk Perempuan dan P/CVE
WPS	Perempuan, Perdamaian dan Keamanan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagaimana diketahui bahwa radikalisasi, pergeseran menuju ekstremisme kekerasan, di Asia Tenggara terjadi pada masa damai, ketika konflik telah mereda, dan/atau bahkan di negara-negara yang tidak mengalami konflik internal apa pun. Studi terbaru juga menunjukkan bahwa ada perbedaan terkait keterlibatan perempuan dan laki-laki dengan konten dan organisasi ekstremis, terutama dalam konteks proses radikalisasi, rekrutmen, dan partisipasi.¹

Laporan ini mengidentifikasi tren yang terus-menerus terjadi dan dinamika gender yang berubah-ubah terkait ekstremisme kekerasan dalam konteks pandemi COVID-19, berdasarkan survei terhadap pakar dan penelitian wawancara yang dilakukan antara bulan Juli dan November 2021. Laporan ini juga menggambarkan bagaimana dan sejauh mana kepercayaan yang mendorong permusuhan dan kebencian terhadap perempuan memicu ekstremisme kekerasan di kawasan Asia Tenggara selama pandemi, sejauh mana kepercayaan yang mendorong permusuhan dan kebencian terhadap perempuan di kawasan ASEAN mendorong ekstremisme kekerasan, dan bagaimana semua ini mewujud dalam ruang offline. Laporan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

•
 Apa yang menjadi tren dan dinamika perubahan utama dari ekstremisme kekerasan dalam konteks COVID-19, termasuk terkait perekrutan, propaganda, dan/atau penyebaran misinformasi dan disinformasi untuk memicu kepercayaan yang mendorong permusuhan dan kebencian (baik online maupun offline) untuk membenarkan dan melegitimasi kekerasan terhadap perempuan di kawasan ASEAN?

•
 Sampai sejauh mana ruang offline memperkuat kepercayaan yang mendorong permusuhan dan kebencian terhadap perempuan, yang pada gilirannya berpotensi semakin memicu ekstremisme kekerasan?

•
 Apa hal-hal yang diperdebatkan antara perempuan dan laki-laki dalam komunitas yang terdampak oleh kelompok ekstremis kekerasan di kawasan ASEAN? Bagaimana cara perempuan dan laki-laki mengatasi atau melawan pengaruh ini secara berbeda? Apa saja dinamika gender yang muncul dan apa konsekuensinya?

4

•• Ketika merancang dan mengimplementasikan kebijakan P/CVE yang responsif gender, perspektif interseksionalitas harus disematkan/direfleksikan ke dalam percakapan substantif di balik proses perancangan tersebut, dan partisipasi aktif harus disertakan selama perumusan kebijakan. Banyaknya inisiatif implementasi konkret Rencana Aksi Nasional (RAN) P/CVE di tingkat lokal, yang menandakan telah terjadinya koordinasi di berbagai tataran di antara kementerian/lembaga di tingkat pemerintah pusat dan daerah, menunjukkan potensi diakuinya P/CVE sebagai agenda bersama berdasarkan masyarakat yang terdampak ekstremisme berbasis kekerasan.²

Seperti yang dinyatakan oleh seorang pakar yang diwawancarai untuk penelitian:

“

Tidak ada kelompok ekstremis yang mendukung ideologi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki

”

Dalam pesan dan strategi mereka, “kelompok ekstremis kekerasan selalu menempatkan perempuan sebagai penyelamat atau penyebab kondisi yang dianggap tidak bermoral.” Namun ada beberapa kelompok moderat yang mendukung kesetaraan gender sebagai kontra-narasi terhadap ideologi ekstremis dan ekstremis kekerasan. Hampir semua pakar sepakat bahwa konten intoleran online ini berbahaya bagi perempuan di ruang offline, dan bahwa COVID-19 telah mengakibatkan ketidakamanan yang lebih signifikan bagi perempuan yang terkena dampak ekstremisme berbasis kekerasan dalam hal radikalisasi, perekrutan, dan efek dari wacana online yang mempromosikan pandangan seksis, kontrol dan penaklukan terhadap perempuan.

Ini termasuk melalui penyebaran misinformasi dan disinformasi, yang diamati oleh peserta telah meningkat selama COVID-19. Perilaku online tidak hanya memengaruhi peran, praktik, dan rekrutmen ekstremis yang kejam, tetapi juga mengakibatkan ketidakamanan di ruang offline, termasuk peningkatan risiko kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender.

Meskipun ada kesamaan cara kelompok ekstremis kekerasan melakukan propaganda dan memanfaatkan media

sosial untuk merekrut dan meradikalisasi perempuan dan laki-laki secara berbeda, serta bagaimana mereka mendukung pandangan seksis terhadap perempuan, perbedaan tetap ada antara kelompok-kelompok ini, tergantung dari organisasi mereka sendiri, serta lingkungan geopolitik di sekitar wilayah operasi mereka dan ideologi yang dianut. Misalnya, walaupun pendekatan P/CVE yang ada umumnya dibuat dengan mengantisipasi ancaman ekstremis kekerasan yang ditimbulkan oleh jihadisme, mereka yang diwawancarai mengingatkan bahwa ekstremisme etno-nasionalis (seperti dalam kasus Malaysia) dan pemberontakan komunis (seperti dalam kasus Filipina) berpotensi juga menimbulkan risiko yang serta merta muncul atau risiko yang terjadi di masa depan, yang saat ini belum diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program yang ada. Karena itu, penting untuk mempertimbangkan bahwa sementara organisasi merekrut dan meradikalisasi perempuan dan laki-laki secara berbeda, norma-norma gender yang dominan ada di dalam ideologi yang dianut dapat memengaruhi proses-proses ini melalui cara yang berbeda. Oleh karena itu, disarankan untuk menghindari pendekatan “one-size-fits-all”.

Temuan studi ini perlu memberi masukan pada pengembangan kebijakan dan program P/CVE yang saat ini sedang berlangsung di kawasan Asia Tenggara. Lebih dari separuh responden ahli setuju bahwa pertumbuhan misogini di ruang online dan kebencian terhadap perempuan diakomodir dalam kebijakan dan program P/CVE yang ada saat ini. Kebijakan yang lebih responsif gender akan dapat mengatasi dimensi spesifik gender terkait peningkatan radikalisis online serta dampaknya terhadap perekrutan laki-laki dan perempuan ke dalam ekstremisme berbasis kekerasan yang dilakukan secara offline.

BERDASARKAN STUDI PENELITIAN, KAMI MENGUSULKAN REKOMENDASI BERIKUT UNTUK KEBIJAKAN DAN PROGRAM P/CVE DI KAWASAN ASEAN:

7

Kebijakan P/CVE harus didasarkan pada analisis sensitif gender terhadap penyebab radikalisis individu yang bertransformasi menjadi ekstremisme kekerasan. Termasuk di dalamnya pengakuan bahwa proses radikalisis dan pendorong menuju ekstremisme kekerasan dapat berbeda antara perempuan dan laki-laki.

Dari data survei dan wawancara kami, kekhawatiran umum yang sering muncul adalah bahwa pembuat kebijakan belum sepenuhnya mengakui bahwa proses radikalisis di kalangan perempuan dan laki-laki berbeda, meskipun mereka direkrut dan berpartisipasi dalam organisasi yang sama. Sederhananya, perbedaan yang mendorong terjadinya radikalisis pada perempuan dan laki-laki tidak hanya berbeda, tetapi juga sangat terkait dengan peran gender. Penting untuk dicatat, bahwa bagaimanapun, perempuan dan laki-laki tidak dapat diperlakukan secara monolitik, tetapi faktor-faktor yang mendorong laki-laki untuk bergabung dengan kelompok ekstremis kekerasan mungkin tidak sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan.

Penilaian risiko harus memasukkan indikator spesifik gender terkait radikalisis dan memasukkan kepercayaan yang mendorong permusuhan dan kebencian terhadap perempuan sebagai indikator. Pemantauan indikator-indikator ini

harus dilihat sebagai indikator yang terkait namun berbeda jika dilihat dalam konteks dinamika konflik yang lebih luas. Penilaian ini memuat identifikasi di tataran individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki sikap seksis (yang berbeda dengan norma-norma gender diskriminatif yang ada dalam ideologi kelompok) khususnya mereka yang berisiko melakukan kekerasan. Penilaian ini harus responsif terhadap beragam ideologi yang ada di seluruh kawasan ASEAN.

2

Perumusan kebijakan P/CVE saat ini harus mempertimbangkan hasil analisis sensitif gender dari semua bentuk ekstremisme dan ekstremisme kekerasan dan harus membedakan antara ekstremisme etno-nasionalis, ekstremisme sayap kanan dan pemberontakan komunis di tempat-tempat yang tidak menempatkan agama dalam dimensi utama ideologi.

Ideologi sebagian besar organisasi ekstremis kekerasan berhubungan erat dengan dimensi gender. Cara kelompok ekstremis kekerasan membangun norma gender, termasuk bagaimana kelompok dapat menghasilkan maskulinitas dan norma gender yang dapat memungkinkan atau membatasi partisipasi perempuan, tidak hanya penting dalam memahami kekerasan tetapi juga dalam menormalisasi perilaku tertentu. Misalnya, konstruksi norma gender dalam kelompok dapat “berdampak pada kemungkinan kekerasan perempuan ditolerir sebagai hal yang sah oleh kelompok teroris; tentang peran yang dibayangkan yang semestinya dimainkan perempuan; pada perilaku yang dianggap normal untuk laki-laki; dan tentang perlakuan terhadap perempuan sebagai musuh”.³

Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan keberadaan ancaman di negara-negara anggota ASEAN dan ideologi organisasi ekstremis serta cara-cara yang mereka tempuh agar dapat menarik perempuan dan laki-laki secara berbeda. Meskipun ekstremisme kekerasan oleh jihadis terus menimbulkan ancaman tak berkesudahan di kawasan ASEAN, penting untuk juga menghitung ekstremisme kekerasan dan konflik yang ditimbulkan oleh kelompok sayap kanan, etno-nasionalis dan komunis dan strategi berbeda yang mereka pakai untuk merekrut dan mempertahankan keterlibatan perempuan dan laki-laki.

3

Perbedaan dampak terorisme pada perempuan dan anak perempuan harus diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program P/CVE.

Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan konteks lokal mereka di seluruh kawasan ASEAN dan mengembangkan program yang berfokus pada perempuan dan anak perempuan yang secara khusus mencerminkan bagaimana dinamika gender berperan dalam radikalisis, serta memikirkan bagaimana memastikan stereotip gender yang tidak valid bahwa perempuan selalu menjadi korban atau bahwa mereka ditipu untuk bergabung dengan kelompok ekstremis. Hal ini terutama terjadi ketika memikirkan pemulangan mereka yang secara aktif atau pasif terlibat dengan Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) atau tinggal di wilayah pengaruh proto-negara mereka.

Perlu dicermati bahwa perempuan dan anak perempuan dapat menjadi korban, pelaku, pendukung, pemberi pengaruh, dan peserta aktif dalam organisasi teroris, yang memerlukan pemahaman yang kompleks dan beragam tentang berbagai faktor risiko. Semua ini lebih lanjut berdampak pada dinamika komunikasi online/offline yang terutama meningkat selama pandemi COVID-19, saat penggunaan media sosial oleh perempuan dan keterlibatan mereka dalam obrolan dan forum grup – termasuk forum online perempuan – selama imbauan tinggal di rumah diberlakukan membuat perempuan mendapatkan dorongan untuk bergabung dengan organisasi ekstremis kekerasan. Selain itu, pelatihan online mengenai keselamatan yang sensitif gender dapat direkomendasikan untuk petugas keamanan dan intelijen tentang cara mengidentifikasi sikap seksis di platform online.

4

Program-program P/CVE harus mendukung pengembangan kontra-narasi melawan ekstremisme kekerasan dan mengedepankan suara perempuan serta pengalaman terkait misogini

– termasuk pengalaman mereka yang sebelumnya terlibat dengan organisasi ekstremis dan mereka yang menjunjung kesetaraan gender untuk menentang narasi misoginis. Beberapa peserta dalam penelitian kami mengidentifikasi bahwa organisasi ekstremis kekerasan di seluruh wilayah berusaha untuk tidak melegitimasi perempuan dalam posisi sebagai pemimpin. Suara perempuan dan kontra-narasi melawan ekstremisme kekerasan harus diperkuat oleh para pemimpin di masyarakat, OMS dan pemerintah, dan integrasi semua elemen ini harus disertakan dalam inisiatif dukungan dan rujukan dan pelatihan *e-safety* yang sensitif gender dalam bentuk digital.

Pada saat yang sama, para pembuat kebijakan harus mengakui bahwa kontra-narasi juga berpotensi secara tidak langsung mengorbankan atau menciptakan kerentanan bagi perempuan. Pembuat kebijakan dan pemimpin tidak hanya harus memperkuat suara perempuan dan mengangkat kontra-narasi, tetapi mereka dan organisasi mereka juga harus menjadi teladan dalam menantang sikap seksis yang bermusuhan. Karena itu, sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk melibatkan OMS dan kelompok perempuan dalam merancang kontra-narasi ini, karena mereka ini lah yang paling memiliki pengetahuan yang luas dalam memahami isu setempat yang dapat memicu timbulnya ekstremisme kekerasan dan mereka inilah juga yang dapat menawarkan solusi alternatif di tingkat masyarakat.

5

Para pembuat kebijakan harus mendengarkan dan melibatkan komunitas yang ada di sekitar kelompok-kelompok ekstremis kekerasan.

Penting untuk melibatkan perempuan dan OMS yang memang sudah berada di garis depan aktivitas ekstremis kekerasan, yang memahami konteks lokal, memiliki kontak lokal dan memahami isu-isu lokal baik yang nyata maupun yang dianggap ada. Strategi P/CVE yang dibuat untuk seluruh kawasan memang cenderung bersifat umum, dan penelitian kami menemukan bahwa strategi ini perlu dibuat tidak hanya

lebih spesifik terkait pengalaman terkait peran gender pada perempuan dan laki-laki, tetapi juga pada beragam ideologi ekstremis dan lingkungan spesifik yang ada di sekitar mereka.

Inisiatif dan organisasi perdamaian di tingkat akar rumput dapat memainkan peran kunci dalam ruang P/CVE dan menjembatani kesenjangan antara pemerintah, pembuat kebijakan, dan masyarakat lokal. Bahkan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hal ini secara bersamaan dapat berkontribusi meningkatkan akuntabilitas lembaga pemerintah dan kementerian – termasuk untuk upaya melakukan pengarusutamaan gender – dan berpotensi mengurangi kerentanan masyarakat yang berisiko. Selain itu, hal ini dapat diperluas untuk mencakup fokus khusus pada reformasi dan pelatihan sektor keamanan.

Salah satu cara organisasi sektor keamanan melawan seksisme yang memuat sikap permusuhan dan kebencian terhadap perempuan yaitu dengan menonjolkan angkatan kerja yang inklusif, menentang impunitas atas kekerasan berbasis gender dan menangani kekerasan dan pelecehan seksual di organisasi mereka sendiri – yang sering menjadikan perempuan dan penganut agama minoritas sebagai sasaran mereka. Masyarakat perlu menyaksikan adanya sektor keamanan yang inklusif dan responsif terhadap keprihatinan dan kebutuhan mereka dan yang tidak memprovokasi ekstremisme.

6

Perumusan RAN P/CVE bisa sangat terlembaga, tetapi tidak harus kaku. Ini bisa menjadi proses partisipatif, dengan keterlibatan tidak hanya dari organisasi kementerian tetapi juga dari OMS.

Perumusan RAN P/CVE yang terhubung ke kerangka nasional Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (WPS) sangat penting untuk mengatasi dinamika misogini dan daya tarik ekstremisme kekerasan, terutama sikap seksis dan maskulinitas dan feminitas yang dibangun secara sosial yang memberikan lahan subur bagi tumbuhnya radikalisme dan kekerasan. Studi kasus kami tentang penyusunan RAN P/CVE Indonesia, dan implementasi yang sedang berlangsung diharapkan dapat memberikan pelajaran yang dapat membantu pengembangan rencana aksi lainnya di seluruh kawasan.

Sebagaimana diidentifikasi dalam laporan ini, beragamnya inisiatif implementasi RAN P/CVE di tingkat lokal karena adanya koordinasi multilevel antara lembaga lokal dan nasional, memungkinkan diangkatnya P/CVE sebagai agenda yang diusung bersama oleh pemerintah dan masyarakat di tataran akar rumput. Pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa penyusunan RAN P/CVE akan menyertakan aspek interseksionalitas dan perspektif yang beragam dalam perumusannya. Upaya nyata harus dilakukan untuk memastikan kontribusi OMS dalam bentuk pengakuan terhadap keberadaan dan keterwakilan mereka dengan mendengarkan suara dan pengalaman mereka pada proses penyusunan. Proses ini akan memperlihatkan partisipasi signifikan mereka, sekaligus terciptanya peluang untuk mendiskusikan dan memperdebatkan konsep-konsep kunci, termasuk gender, yang sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan strategi P/CVE dan kebijakan P/CVE yang khusus dikembangkan untuk tujuan ini.

PENDAHULUAN

Cetak Biru Politik dan Keamanan ASEAN (2015-2025) menetapkan visi untuk membangun komunitas yang 'menghormati sepenuhnya perbedaan agama, budaya dan bahasa masyarakat kita, menjunjung tinggi nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keragaman dan mengatasi ancaman ekstremisme kekerasan dalam segala bentuk dan manifestasinya'. Dokumen ini mengakui bahwa di Negara-negara Anggota ASEAN teroris terus mengembangkan strategi dan taktik baik sebagai kelompok maupun individu, termasuk taktik baru yang melibatkan perempuan dan anak-anak dalam serangan mereka. Lembaga penegak hukum negara-negara anggota ASEAN telah melakukan beberapa kegiatan koordinasi dan kolaborasi, termasuk upaya bersama untuk berbagi informasi yang efektif tentang jaringan teroris lintas batas.

Deklarasi Manila 2017 juga meminta Negara-negara Anggota ASEAN untuk mengatasi ancaman ekstremisme kekerasan, khususnya: 1) mencegah radikalisme, pembiayaan, rekrutmen dan mobilisasi individu ke dalam kelompok teroris; 2) mempertimbangkan deradi-

kalisasi dalam program rehabilitasi dan reintegrasi sebagai alternatif tindakan hukuman; dan 3) melakukan program pengembangan kapasitas untuk mendidik kaum muda dan populasi rentan lainnya tentang pentingnya moderasi dan penyelesaian konflik secara damai.

Selanjutnya, Rencana Kerja ASEAN Bali 2019-2025, yang disahkan pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional ke-13 pada November 2019, di bawah Prioritas 1.5, secara khusus bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender untuk meningkatkan kapasitas, partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam mempromosikan moderasi dan toleransi untuk mencegah munculnya radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Dalam konteks kebijakan ASEAN dan P/CVE di negara-negara anggota, kebijakan pencegahan juga harus sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum, dan kebijakan harus dikembangkan yang inklusif, partisipatif dan sejalan dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Hal ini sangat relevan dengan SDGs tujuan 16, yaitu 'mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif pada semua tingkatan'. Dalam SDGs, pendekatan komprehensif yang melibatkan seluruh komponen pemerintah dan masyarakat disebut sebagai 'pendekatan pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan'. Kunci dalam memahami politik P/CVE, pendekatan ini menggambarkan bagaimana pemerintah, warga negara, OMS, akademisi, dan sektor swasta memiliki peran penting dalam berkontribusi pada pencapaian hasil pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, studi kasus utama dalam proyek ini, pendekatan ini digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Ekstremisme yang Mengarah pada Terorisme 2020-2024 (selanjutnya disebut sebagai RAN-PE).

Dengan mempertimbangkan prioritas-prioritas tersebut, penelitian ini mengkaji seberapa jauh dan dengan cara apa misogini dan sikap permusuhan memicu ekstremisme kekerasan di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam konteks pandemi COVID-19. Ekstremis kekerasan di kawasan ASEAN telah menyebarkan misinformasi dan mengirimkan pesan kekerasan secara online dan memanfaatkan krisis, yang terbaru krisis COVID-19, melalui propaganda online untuk meradikalisasi, merekrut, dan memobilisasi anggota-anggota kelompok. Sementara semakin banyak pakar telah mengidentifikasi hubungan antara norma gender, identitas gender, ideologi gender dan ekstremisme kekerasan atau terorisme,

hingga saat ini masih sedikit penelitian yang membahas bagaimana misogini dan keyakinan seksis mengandung permusuhan disebarkan secara online dapat memengaruhi komunitas offline, yang secara nyata menimbulkan ketidakamanan khususnya bagi perempuan dan anak perempuan. Pemahaman yang lebih besar tentang hubungan dan peran gender dan peran pentingnya untuk melawan dan mencegah ekstremisme kekerasan juga diperlukan di luar peran perempuan dalam serangan-serangan kalangan atas.⁴

Studi penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dan sejauh mana misogini dan sikap permusuhan memicu ekstremisme kekerasan di kawasan Asia Tenggara selama pandemi. Kajian ini mengkaji sejauh mana kepercayaan yang mendorong permusuhan dan kebencian terhadap perempuan di kawasan ASEAN memicu ekstremisme kekerasan, dan bagaimana keyakinan ini bermanifestasi di ruang offline. Kajian ini menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- 1. Apa yang menjadi tren dan dinamika utama perubahan ekstremisme kekerasan dalam konteks COVID-19, termasuk perekrutan, propaganda dan/atau penyebaran informasi yang salah dan disinformasi untuk memicu kepercayaan yang mendorong permusuhan dan kebencian terhadap perempuan (baik online maupun offline) untuk membenarkan dan melegitimasi kekerasan terhadap perempuan di kawasan ASEAN?
- 2. Sampai sejauh mana ruang offline memperkuat sikap permusuhan dan kebencian terhadap perempuan, yang pada gilirannya

berpotensi semakin memicu ekstremisme kekerasan?



Apa hal-hal yang diperdebatkan antara perempuan dan laki-laki dalam komunitas yang terdampak oleh kelompok ekstremis kekerasan di kawasan ASEAN? Bagaimana cara perempuan dan laki-laki mengatasi atau melawan pengaruh ini secara berbeda? Apa dinamika gender dan apa konsekuensinya?



Apa yang dapat kita pelajari dari upaya regional dan nasional dalam mempromosikan dan mengimplementasikan P/CVE di Negara-negara Anggota ASEAN? Apa saja pencapaian dan tantangan utamanya? Apa rekomendasi kebijakan dan yang harus dipertimbangkan untuk P/CVE dan sektor keamanan?



Bagaimana perspektif gender dapat dimasukkan ke dalam kebijakan dan praktik, termasuk penilaian risiko, serta peran masyarakat sipil dan organisasi perempuan dalam memperkuat strategi P/CVE di ASEAN?

Dengan melakukan survei dan wawancara dengan pakar utama P/CVE, pemangku kepentingan, dan praktisi di kawasan ASEAN, penelitian ini berupaya meningkatkan pengetahuan tentang penguatan ideologi gender saat ini, dan bagaimana kebencian terhadap perempuan dan sikap permusuhan memengaruhi peran, praktik, dan rekrutmen kelompok ekstremis keras. Penelitian

kami menemukan ada konsensus bahwa konten intoleran online berbahaya bagi perempuan di ruang offline, dan bahwa COVID-19 telah mengakibatkan ketidakamanan yang lebih signifikan bagi perempuan yang terkena dampak ekstremisme kekerasan, situasi yang khususnya diperburuk oleh pembatasan sosial dan meningkatnya pertemuan-pertemuan online, serta paparan misinformasi dan disinformasi mengenai pandemi.

Perilaku online tidak hanya berdampak pada peran, praktik, dan rekrutmen ekstremis kekerasan, tetapi juga mengakibatkan ketidakamanan di ruang offline, termasuk peningkatan risiko kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. Meskipun ada kesamaan cara kelompok ekstremis kekerasan melakukan propaganda dan memanfaatkan media sosial untuk merekrut dan meradikalisasi perempuan dan laki-laki secara berbeda, serta bagaimana mereka mendukung pandangan seksis terhadap perempuan, perbedaan tetap ada antara kelompok-kelompok ini, tergantung dari organisasi itu sendiri, serta lingkungan geopolitik di sekitar wilayah operasi mereka dan ideologi yang dianut.

Dalam pengertian itu, ditemukan bahwa misogini dan sikap permusuhan terhadap perempuan memainkan peran kunci dalam membingkai narasi, partisipasi dan peran/tugas baik perempuan dan laki-laki dalam organisasi ekstremis di seluruh kawasan ASEAN. Akibatnya, penting untuk mempertimbangkan bahwa sementara organisasi merekrut dan meradikalisasi perempuan dan laki-laki dengan cara yang berbeda, norma-norma gender yang lazim dalam ideologi yang dianut dapat memengaruhi proses dengan

cara yang berbeda dan oleh karena itu kita harus berhati-hati terhadap pendekatan “one-size-fits-all”.

Temuan-temuan dari studi ini dapat membantu pengembangan kebijakan dan program P/CVE saat ini di kawasan Asia Tenggara. Lebih dari separuh responden ahli setuju bahwa pertumbuhan misogini online dan sikap permusuhan terhadap perempuan tidak tercermin dalam

kebijakan-kebijakan P/CVE saat ini. Harus ada lebih banyak kebijakan-kebijakan P/CVE yang mengatasi dimensi gender dari peningkatan radikalisme online dan dampaknya pada perekrutan offline laki-laki dan perempuan ke ekstremisme kekerasan, dengan memberikan perhatian khusus pada perbedaan norma gender yang dianut dalam berbagai ideologi di seluruh kawasan ASEAN, termasuk ideologi-ideologi etno-nasionalis, sayap kanan dan komunis.

KERANGKA-KERANGKA KEBIJAKAN YANG ADA DI KAWASAN ASEAN

C OVID-19 telah mengakibatkan perubahan tren dalam ekstremisme kekerasan, termasuk sejauh mana kepercayaan yang mendorong permusuhan dan kebencian terhadap perempuan disebarkan melalui propaganda, penyebaran misinformasi dan disinformasi serta upaya-upaya perekrutan, termasuk yang membenarkan dan melegitimasi kekerasan terhadap perempuan di seluruh kawasan ASEAN. Oleh karena itu, penelitian yang mengeksplorasi titik persimpangan antara ruang online dan offline diperlukan; khususnya, kita perlu memahami apakah dan di mana dinamika misoginis dan seksis, yang memanifestasikan dirinya secara online, memperkuat identitas dan ideologi gender di ruang offline, sehingga membenarkan kekerasan dan sikap permusuhan terhadap perempuan.

Tinjauan literatur pendahuluan ini mengkaji sejauh mana perspektif gender telah dimasukkan ke dalam kebijakan dan pernyataan regional ASEAN tentang P/CVE, dan apakah kerangka kerja nasional – seperti RAN tentang P/CVE – telah memasukkan perspektif gender dan komitmen responsif gender untuk mengatasi misogini dan sikap permusuhan dan seksis yang dapat memicu ekstremisme dan membenarkan penggunaan kekerasan.

1. PENGAKUAN PERSPEKTIF GENDER TENTANG KONFLIK DAN EKSTREMISME KEKERASAN DI KAWASAN ASEAN

Selama lima tahun terakhir, sejak Deklarasi Manila untuk Menanggulangi Kebangkitan Radikalisasi dan Ekstremisme Kekerasan oleh ASEAN dan Pernyataan Bersama para Pemimpin ASEAN tentang Mempromosikan

Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di ASEAN, telah ada peningkatan pengakuan akan kebutuhan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam cara-cara mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh terorisme dan ekstremisme kekerasan dalam pernyataan, kerangka kerja dan rencana implementasi ASEAN dan Negara-negara Anggota ASEAN.

Termasuk di dalamnya adalah pengakuan bahwa perempuan memainkan peran kunci dalam proses perdamaian dan dalam

situasi pasca-konflik, dan kebutuhan untuk terus mempromosikan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender – terutama mengingat efek COVID-19 yang tidak proporsional pada perempuan dan anak perempuan di kawasan, sebagaimana didokumentasikan dalam [ASEAN Gender Outlook \(2021\)](#)⁵ Kerangka Pemulihan Komprehensif ASEAN untuk COVID-19 telah memprioritaskan pengarusutamaan gender dan Perempuan, Perdamaian dan Keamanan sebagai bagian dari strateginya untuk memperkuat keamanan manusia dalam menanggapi COVID-19 dan ancaman lain terhadap stabilitas dan kemakmuran kawasan.

Kerangka kerja dan kebijakan regional di kawasan belakang ini memuat pengakuan akan pentingnya mencegah ekstremisme kekerasan dan terorisme di samping upaya membangun ketahanan dan kohesi sosial. Cetak Biru Politik dan Keamanan ASEAN (2015-2025) menetapkan visi untuk komunitas yang ‘menghormati sepenuhnya perbedaan agama, budaya, dan bahasa masyarakat kita, menjunjung tinggi nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keragaman, serta mengatasi ancaman ekstremisme kekerasan dalam segala bentuk dan manifestasinya’.

Deklarasi Manila 2017 menyerukan kepada Negara-negara Anggota ASEAN untuk mengatasi ancaman ekstremisme kekerasan, khususnya:

- 1 untuk mencegah radikalisme, pembiayaan, rekrutmen dan mobilisasi individu ke dalam kelompok teroris;
- 2 untuk mempertimbangkan deradikalisasi dalam program rehabilitasi dan reintegrasi sebagai alternatif tindakan hukuman; dan

- 3 untuk melakukan program pengembangan kapasitas untuk mendidik kaum muda dan populasi rentan lainnya tentang pentingnya moderasi dan penyelesaian konflik secara damai.⁶

Ada pengakuan khusus tentang peran OMS, sektor swasta dan organisasi non-pemerintah yang bekerja sama dengan negara-negara ASEAN, yang mencegah proses radikalisme, yang mengarah pada ekstremisme kekerasan dan terorisme serta sifat, metode, dan operasi transnasional mereka. Sebagai bagian dari deklarasi ini, terdapat komitmen khusus untuk mengembangkan pendekatan berbasis bukti terpadu untuk mengatasi munculnya radikalisme dan ekstremisme kekerasan, termasuk pemberdayaan perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender (Prioritas 1.5). Deklarasi Manila merupakan kerangka penting karena melahirkan kerangka kerja lain seperti Rencana Aksi Regional PVE dan selanjutnya Rencana Kerja Bali (2019-2025).

Deklarasi Manila mencerminkan komitmen yang dibuat dalam **Pernyataan Bersama para Pemimpin ASEAN tentang Mempromosikan Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di ASEAN pada tahun 2017**⁷ yang menyatakan keprihatinan tentang peningkatan ancaman yang ditimbulkan oleh konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya, munculnya ekstremisme kekerasan dan meningkatnya jumlah pengungsi (yang meninggalkan negara dan pengungsi domestik), termasuk perempuan dan anak-anak. Pernyataan Perempuan, Perdamaian dan Keamanan tersebut mendorong integrasi perspektif gender dalam semua inisiatif dan strategi pencegahan konflik. Ini juga mendukung upaya untuk memastikan partisipasi penuh perempuan

dalam proses perdamaian, termasuk membangun kapasitas mereka baik di tingkat regional, nasional dan lokal.

Pada tahun 2017 Deklarasi ASEAN tentang Budaya Pencegahan untuk Masyarakat yang Damai, Inklusif, Tangguh, Sehat dan Harmonis⁸ juga secara khusus mengakui prevalensi berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan terhadap perempuan, anak-anak dan kelompok rentan, penyalahgunaan narkoba, kejahatan remaja, kejahatan kebencian/ujaran kebencian, penggunaan media yang tidak bertanggung jawab, intoleransi dan ekstremisme kekerasan yang berpotensi merusak perdamaian dan keamanan masyarakat. Deklarasi ASEAN itu selanjutnya mengakui kebutuhan mendesak untuk mengatasi akar penyebab ekstremisme kekerasan dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya untuk memastikan bahwa komunitas ASEAN tetap bersatu.

Pada pertemuannya yang ke-12 di bulan Oktober 2018, Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN Mengenai Kejahatan Transnasional (AMMTC) menyetujui Rencana Aksi ASEAN mengenai P/CVE 2018-2025, yang hasilnya meminta *Working Group on Counter Terrorism of the Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC)* untuk segera menyusun dan menyerahkan Rencana Kerja Bali kepada SOMTC dan AMMTC.

Pada tahun 2019, **Pernyataan Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN tentang Mempromosikan Agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di Forum Regional ASEAN** secara eksplisit mengakui agenda WPS dan berkomitmen pada berbagai langkah untuk membuat kemajuan dalam agenda, terutama dalam pengaturan konflik.⁹ Antara lain, pernyataan komitmen untuk mencegah, menanggapi dan mengakhiri segala bentuk kekerasan, pelecehan seksual yang dilakukan dalam situasi konflik ber-



keinginan bersama di antara Negara-negara Anggota ASEAN untuk memperkuat kerja sama dalam mencegah dan melawan munculnya radikalisme dan ekstremisme kekerasan



senjata; melindungi hak-hak perempuan dalam situasi konflik; untuk melibatkan laki-laki dan anak laki-laki dalam mendukung pemberdayaan perempuan; untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan sebagai cara untuk mengatasi penyebab konflik bersenjata; dan untuk mendukung peran perempuan dalam mempromosikan budaya dan perdamaian.

Lebih lanjut, hal tersebut secara khusus berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi bermakna perempuan dalam pencegahan, pengelolaan dan penyelesaian konflik bersenjata, serta rekonstruksi dan rehabilitasi pembangunan perdamaian pasca-konflik. Ini termasuk membangun kapasitas perempuan sebagai pembangun perdamaian, termasuk sebagai mediator dan negosiator. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pernyataan Pers Ketua Dialog Tingkat Menteri ASEAN tentang Penguatan Peran Perempuan untuk Perdamaian dan Keamanan Berkelanjutan¹⁰ in pada tahun 2020, di mana peningkatan peran perempuan dalam proses perdamaian

diminta, seperti dalam pencegahan dan resolusi konflik, rekonstruksi dan rehabilitasi pasca konflik.

Pada tanggal 4-5 April 2019, BNPT melalui Deputi Kerjasama Internasional Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral menyelenggarakan Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Pilar ASEAN untuk menyusun Rencana Kerja ASEAN untuk Mencegah dan Mengatasi Kebangkitan Radikalisme dan Ekstremisme Kekerasan (ASEAN PoA PCRVE) 2019-2025 di Hotel Pullman Bali. Pertemuan ini merupakan inisiatif Indonesia untuk menyusun rencana kerja ASEAN PoA PCRVE 2019-2025. Agenda utama adalah membahas draft rencana kerja yang telah disusun oleh SOMTC Indonesia.

Salah satu usulan Indonesia terkait rencana kerja dipusatkan pada upaya mencari masukan dan tanggapan dari peserta rapat mengenai perlunya dibentuk mekanisme monitoring dan evaluasi. Hal ini dirancang untuk implementasi rencana kerja melalui Multi-Sectoral Task Force (MTF), yang berada di bawah koordinasi SOMTC Working Group on CT dan Sekretariat ASEAN. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh anggota ASEAN, dan rencana kerja tersebut menjadi metode bagi Negara-negara Anggota untuk menangani bidang-bidang yang terkait dengan masalah ekstremisme kekerasan secara bersama-sama, bilateral, regional (ASEAN) dan multilateral.

Pada 7-8 Agustus 2019 telah diselenggarakan Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Pilar ASEAN ke-2 untuk Penyusunan ASEAN PoA PCRVE 2018-2025 di Hotel Shangrila, Surabaya, Indonesia. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas masukan dari negara-negara anggota SOMTC dan Entitas/Organisasi/Badan Sektoral ASEAN yang hadir pada 1st Meeting tentang draft Work Plan ASEAN PoA PCRVE 2018-2025 yang lebih dikenal dengan Draft Bali Work Plan.

PoA pokok yang disampaikan dalam pertemuan tersebut antara lain tinjauan pertemuan pertama ASEAN PoA PCRVE yang diselenggarakan di Bali, dan hasil pertemuan Civil Society Organization (OMS) Consultation ASEAN PoA PCRVE 2018-2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 2-3 Juli 2019. Hal lain yang disampaikan adalah masukan dari perwakilan SOMTC negara-negara ASEAN dan Entitas/Organisasi/Badan Sektoral ASEAN terkait dengan Rancangan Rencana Kerja Bali dan diskusi tentang mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja.

ASEAN PoA PCRVE 2018-2025 menunjukkan keinginan bersama di antara Negara-negara Anggota ASEAN untuk memperkuat kerja sama dalam mencegah dan melawan munculnya radikalisme dan ekstremisme kekerasan. SOMTC Indonesia, selaku Ketua Kelompok Kerja Kontraterorisme dengan Pemerintah Amerika Serikat, menyelenggarakan Workshop ASEAN-AS tentang Penyusunan Rencana Aksi Nasional untuk Memerangi Ekstremisme Kekerasan. Pertemuan tersebut diselenggarakan sebagai upaya mendorong negara-negara ASEAN untuk merumuskan Rencana Aksi Nasional penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme (ekstremisme kekerasan), sejalan dengan rekomendasi ASEAN PoA PCRVE.

Implementasi ASEAN PoA PCRVE kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Bali 2019-2025, Rencana Kerja multisektoral terbesar yang pernah ada di ASEAN. Meskipun ada komitmen kuat dari PBB dan mitra dialog untuk mendukung implementasi Rencana Kerja Rencana Kerja Bali, implementasinya sebagian besar terhambat oleh pandemi.

Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan dan tidak proporsional pada perempuan dan anak perempuan, terutama

terlihat dalam hal peningkatan insiden kekerasan berbasis gender, hilangnya pekerjaan dan mata pencaharian ekonomi, penurunan ketersediaan layanan penting dan sosial serta perawatan kesehatan yang berkualitas dan peningkatan risiko infeksi.¹¹ Pernyataan Pers Ketua KTT Pemimpin Perempuan ASEAN¹² pada tahun 2020 menguraikan pengakuan para Pemimpin bahwa pandemi mengancam untuk membalikkan pencapaian yang diperoleh dengan susah payah yang dicapai dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, dan menyambut baik pendapat untuk mengurangi dampak buruk COVID-19 tentang perempuan dan anak perempuan, termasuk pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama pada masa krisis.

Khusus terkait terorisme, **East Asia Summit Leaders' Statement on Women, Peace and Security**¹³ pada tahun 2020 menegaskan akan terus mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan untuk mengatasi penyebab konflik, seperti kemiskinan, diskriminasi, ketidakadilan sosial dan pengucilan ekonomi dan/atau sosial dari orang dan komunitas yang rentan dan berisiko terhadap ketidakstabilan dan terorisme. Yang penting juga adalah bahwa pernyataan tersebut sekaligus mendorong integrasi perspektif gender ke dalam cara kerja masing-masing upaya keamanan internasional dalam menangani konflik bersenjata.

Pada tahun 2021, **Rencana Aksi antara ASEAN dan PBB Lima Tahun** diterbitkan dan diprakarsai dalam konteks COVID-19. Di antara prioritas strategis lainnya, ia mengakui perlunya bekerja sama untuk memerangi terorisme internasional, dan untuk memperkuat kerja sama dalam

memerangi kejahatan transnasional dan terorisme, pejuang asing, perekrutan, pendanaan teroris, dan pasokan senjata terlarang kepada kelompok teroris. Yang penting, Plan of Action memprioritaskan Agenda WPS dan mendukung implementasi ASEAN Plan of Action P/CVE. Hal ini lebih lanjut mendukung kerjasama dalam pengembangan kapasitas dan berbagi praktik terbaik untuk pencegahan, investigasi dan pengumpulan bukti.

Termasuk di dalamnya adalah upaya pelestarian media dan penuntutan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh teroris dan pendukungnya, termasuk internet dan platform media sosial. Plan of Action juga menekankan dukungan untuk pengembangan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender, khususnya terkait dengan pengarusutamaan gender ke dalam data dan statistik untuk pemantauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan untuk mempromosikan pertukaran praktik terbaik, kerjasama teknis dan pembangunan kapasitas di bidang sosial, pembangunan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Studi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, diluncurkan pada Maret 2021,¹⁴ menyumbangkan empat temuan utama ketika menyelidiki kemajuan agenda WPS di seluruh pilar dan badan komunitas ASEAN, termasuk Negara Anggota ASEAN. Temuan pertama, menjadikan agenda WPS masuk dalam konteks nasional terjadi di negara-negara anggota ASEAN terkait pencegahan ekstremisme kekerasan. Tetapi ada ruang untuk meningkatkan hal ini, yaitu dengan mengembangkan berbagai inisiatif rencana aksi yang relevan dan pelaksanaannya dipantau dalam Rencana Aksi Regional tentang WPS di antara Negara-negara Anggota.

Yang kedua adalah jaringan penciptaan perdamaian, pembangunan perdamaian dan pemeliharaan perdamaian perempuan yang merupakan perkembangan baru di kawasan ASEAN, tetapi ada kesenjangan dalam kepemimpinan dan perwakilan sektor keamanan dalam pemerintahan. Ketiga, lensa WPS semakin banyak diterapkan pada P/CVE dan masalah keamanan non-tradisional, meskipun masih ada kesenjangan dalam perlindungan dalam menangani kekerasan berbasis seksual dan gender dalam konteks konflik, pencegahan krisis dan pencegahan konflik. Terakhir, Pilar Komunitas Politik-Keamanan, Ekonomi, dan Sosial-Budaya ASEAN semuanya telah terlibat sebelumnya dengan agenda WPS, membangun landasan untuk pelembagaan dan integrasi regional lebih lanjut.

ASEAN telah mengakui pentingnya pengarusutamaan gender dan kolaborasi lintas sektoral dalam mempromosikan agenda WPS di seluruh kawasan – termasuk dalam strategi dan program P/CVE. Pengakuan ini dapat dibangun dalam meningkatkan keamanan yang responsif gender, khususnya dalam menanggapi ancaman yang ditimbulkan oleh terorisme. Seperti telah disebutkan, ASEAN telah mendukung perlunya menanggapi ketidakstabilan dan ketidakamanan yang ditimbulkan oleh konflik terhadap perempuan, dan Studi Regional ASEAN tentang WPS mengidentifikasi bahwa ada kesenjangan dalam menangani kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender dalam konteks konflik secara lebih luas. Menanggapi serangan teroris baru-baru ini dan yang semakin meningkat yang melibatkan perempuan sebagai pelaku, berbagai Negara Anggota ASEAN telah mulai mempertimbangkan untuk menerapkan pendekatan lokal untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam melawan dan mencegah upaya ekstremisme kekerasan dan dalam merehabilitasi dan

mengintegrasikan kembali mantan pelaku ekstremis kekerasan.

2. PENDEKATAN LOKAL DI KAWASAN ASEAN

Perempuan memainkan peran yang berbeda dalam organisasi ekstremis kekerasan, termasuk perekrutan, propaganda, penggalangan dana dan bahkan melakukan serangan terhadap komunitas lokal mereka sendiri. Namun, meskipun perempuan dapat secara pasif dan aktif terlibat dalam ekstremisme kekerasan, mereka juga dapat menjadi korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual, yang terutama diperburuk ketika organisasi tersebut mendukung misogini dan kebencian terhadap perempuan. Misalnya, studi UN Women dan Monash Gender, Peace and Security Center 2019 yang meneliti Indonesia, Filipina, dan Bangladesh menemukan bahwa seksisme kebencian dan dukungan untuk kekerasan terhadap perempuan adalah faktor yang paling kuat terkait dengan dukungan untuk ekstremisme kekerasan.¹⁵

Ini menunjukkan bahwa individu yang mendukung kekerasan terhadap perempuan lebih mungkin untuk mendukung ekstremisme kekerasan. Secara positif, negara-negara anggota ASEAN di seluruh kawasan telah mulai menanggapi kebutuhan akan kebijakan yang tanggap gender untuk mencegah ekstremisme kekerasan, untuk mengakui bahwa perempuan mengalami kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual dalam konflik, dan untuk mengakui pentingnya pengarusutamaan gender dan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam program P/CVE secara khusus.

2.1 Indonesia

Indonesia memainkan peran kunci dalam memimpin kerja P/CVE baik di dalam negeri maupun di kawasan ASEAN, dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai bagian yang tidak terpisahkan. BNPT memimpin perumusan RAN P/CVE dengan dukungan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United Nations Development Programme (UNDP) dan UN Women, dan dengan kontribusi dari lembaga pemerintah lainnya, OMS, dan akademisi. Pada tahun 2021, Indonesia secara resmi mengadopsi RAN P/CVE, mengingat meningkatnya ancaman ekstremisme kekerasan dan terorisme di dalam negeri.

RAN P/CVE terdiri dari empat pilar:

- 1 pencegahan (kesiapsiagaan, kontra radikalasi, dan perlindungan);
- 2 deradikalasi;
- 3 penegakan hukum dan penguatan kerangka legislatif; dan
- 4 kemitraan dan kerjasama internasional.

Ini mengintegrasikan prinsip-prinsip pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dan termasuk OMS, khususnya organisasi perempuan, yang telah dimasukkan dalam lokalisasi RAN P/CVE di tingkat provinsi.

BNPT memainkan peran kunci dalam pelaksanaan RAN P/CVE, termasuk merumuskan,

mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, strategi dan program nasional untuk melawan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalasi dan deradikalasi; koordinasi antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme; perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional; mengembangkan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; dan menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.

RAN P/CVE memberikan landasan untuk memfasilitasi pelokalan rencana di mana OMS perempuan memainkan peran kunci dalam merancang dan mengimplementasikan inisiatif untuk mencegah ekstremisme kekerasan, baik pengarusutamaan perspektif gender maupun implementasi pemantauan.

Menurut Studi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan,¹⁶ program-program yang mengintegrasikan perspektif gender telah mulai diterapkan di seluruh negeri. Misalnya, "Desa Damai", yang dilaksanakan di sepanjang pulau Jawa, adalah inisiatif berbasis komunitas yang berpusat pada kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam mempromosikan kohesi sosial dan pencegahan konflik, termasuk dialog untuk memerangi intoleransi dan radikalasi di tingkat desa.

Program-program ini dirancang untuk memberdayakan perempuan sebagai agen perdamaian yang dapat "mempromosikan pemecahan masalah masyarakat, termasuk dialog antaragama untuk pencegahan konflik."¹⁷

OMS-OMS lain terus memainkan peran kunci dalam melatih perempuan tentang metode

kontra-terorisme, baik di rumah maupun dalam inisiatif ketahanan masyarakat. Working Group on Women and Countering/ Preventing Violent Extremism (WGWC) berfungsi sebagai badan koordinasi nasional untuk mempromosikan dialog dan berbagi pengetahuan antara pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil mengenai pengarusutamaan gender dan P/CVE.¹⁸

WGWC didirikan atas keprihatinan bersama tentang meningkatnya keterlibatan perempuan dalam jaringan ekstremis dan penekanan berlebihan pada maskulinitas dalam pendekatan P/CVE. WGWC berisi perwakilan dari 16 OMS, kementerian dan badan pemerintah yang bekerja dalam mencegah ekstremisme kekerasan.¹⁹

2.2 Filipina

Serupa dengan Indonesia, pada tahun 2019 Filipina mengimplementasikan RAN tentang P/CVE yang tidak hanya memberikan peluang bagi keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam keamanan dan pencegahan konflik, tetapi juga Filipina telah bekerja dengan UN Women untuk mengidentifikasi pendekatan yang lebih inklusif terhadap P/CVE.²⁰ RAN terdiri dari ketentuan spesifik gender dan, bersama dengan keahlian dari UN Women, juga mencakup seperangkat pedoman untuk implementasinya oleh para pemangku kepentingan.²¹

Ketentuan-ketentuan khusus gender ditemukan di enam bagian yang diidentifikasi sebagai perumus keseluruhan yang berkontribusi terhadap kerentanan terhadap radikalisme dan ekstremisme kekerasan: komunitas; orang-orang yang dirampas kebebasannya di penjara dan

pelaku kekerasan ekstremis di penjara; tokoh agama; lembaga pembelajaran; pengguna media sosial; dan pekerja dan pelajar Filipina di luar negeri yang dikirim ke luar negeri.

Pedoman ini termasuk memutuskan siapa yang akan memimpin pelaksanaan ketentuan spesifik gender di antara semua pihak; memberikan pelatihan RAN tentang P/CVE, kesetaraan gender dan WPS sebelum implementasi; memastikan bahwa semua program menanggapi faktor-faktor yang mendorong radikalisme; menilai implikasi intervensi bagi perempuan, laki-laki dan perempuan dan pemuda laki-laki; dan untuk memastikan bahwa tindakan terkait gender terkait dengan P/CVE.

Selain itu, pedoman pelaksanaan menetapkan bahwa, jika berlaku, gender diarusutamakan ke dalam kebijakan, pengembangan kapasitas dan mekanisme yang baru dikembangkan; bahwa pilar-pilar RAN tentang WPS telah dipertimbangkan dalam P/CVE; bahwa bahasa yang tidak memihak dan tidak merendahkan digunakan dalam laporan, pelatihan, dan prakarsa implementasi; dan bahwa inklusi dan non-diskriminasi perempuan dan remaja perempuan dioperasionalkan dalam program P/CVE.²²

Penting untuk tujuan penelitian ini – salah satu dari enam bagian RAN Filipina mengidentifikasi efek yang berbeda dari media sosial dan konten online pada perempuan dan laki-laki, termasuk narasi radikal online yang menargetkan maskulinitas yang tidak sehat dan/atau femininitas stereotip. Intervensi khusus termasuk menghasilkan kontra-narasi berdasarkan dokumen-dokumen Islam

dan kontra-narasi untuk maskulinitas yang tidak sehat atau femininitas stereotip yang mempromosikan radikalisme; menghasilkan konten di situs web dan platform media sosial yang menyoroti kisah koeksistensi agama, dan berkolaborasi dengan pendukung pihak ketiga perempuan dan laki-laki (misalnya pemimpin agama/tokoh masyarakat dan mantan ekstremis kekerasan) untuk membuat narasi yang melawan radikalisme dan ekstremisme yang dapat dipromosikan melalui saluran online.²³

3. KOMITMEN DAN PENGAKUAN DARI NEGARA-NEGARA ASEAN LAINNYA

Negara-negara lain di kawasan ASEAN telah mengakui peran ekstremisme kekerasan dan terorisme, termasuk perbedaan radikalisme, rekrutmen dan partisipasi antara perempuan dan laki-laki. Misalnya, **Malaysia** telah mengakui bahwa pendekatan kontra-terorisme garis keras tidak cukup untuk mengatasi ancaman terorisme secara keseluruhan dan bahwa pendekatan P/CVE juga diperlukan untuk menanggapi ancaman tersebut. Akibatnya, Malaysia saat ini mengambil langkah awal menuju pengembangan Rencana Aksi Nasional untuk Menanggulangi dan Mencegah Ekstremisme Kekerasan (NAPCPVE).²⁴

Thailand dan **Kamboja** keduanya memiliki mekanisme resolusi konflik yang lebih luas yang mengakui dampak konflik yang tidak proporsional terhadap perempuan, dan **Brunei** telah mendukung dan mengakui dukungannya terhadap P/CVE baik secara regional maupun global.²⁵ Selanjutnya, pada tahun 2016 **Singapura** mengadopsi National Cybercrime Action Plan (NCAP)²⁶ yang menetapkan strategi pemerintah

untuk menangani kejahatan dunia maya secara efektif.

Strategi ini memiliki empat prioritas utama:

1. mendukung dan memberdayakan masyarakat agar tetap aman di dunia maya;
2. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah untuk memerangi kejahatan dunia maya;
3. memperkuat legislasi dan kerangka peradilan pidana;
4. meningkatkan kemitraan dan keterlibatan internasional.

Meskipun NCAP tidak secara khusus menangani ancaman yang ditimbulkan oleh ekstremisme kekerasan dan perekrutan online, NCAP memberikan dasar untuk menanggapi ancaman dan untuk menciptakan lingkungan online yang aman dan terjamin. Namun, tidak satu pun dari rencana aksi ini yang mengarusutamakan perspektif gender. Menggunakan Indonesia sebagai studi kasus, studi ini memberikan beberapa pelajaran penting dari kasus Indonesia yang dapat diterapkan ke negara-negara lain di kawasan ASEAN.

Sementara Negara-negara Anggota ASEAN di seluruh kawasan telah mulai menanggapi kebutuhan akan kebijakan yang responsif gender terhadap program dan strategi P/CVE, masih ada pemeriksaan yang kurang terhadap dinamika gender tertentu yang memainkan peran kunci dalam radikalisme, rekrutmen dan partisipasi, khususnya peran media sosial, dan bagaimana kepercayaan yang mendorong permusuhan dan kebencian terhadap perempuan dapat menjadi faktor dinamis dalam ketiga proses tersebut.

Selain itu, COVID-19 telah memberikan peluang bagi kelompok ekstremis kekerasan untuk lebih mendukung ujaran kebencian dan kepercayaan yang mendorong permusuhan terhadap perempuan melalui konten online, yang memengaruhi partisipasi dalam ruang offline dan komunitas. Dalam beberapa kerangka kerja yang ada, ekstremisme kekerasan tampaknya diintegrasikan ke dalam strategi pencegahan konflik yang lebih luas, tetapi sangat penting untuk menyadari bahwa radikalisme dapat terjadi selama masa stabilitas, atau bahkan di negara-negara yang tidak mengalami konflik internal. Implikasinya, kita harus berhati-hati dalam mempertimbangkan baik ekstremisme kekerasan maupun terorisme sebagai manifestasi konflik.

Meskipun RAN Filipina mengakui pentingnya kontra-narasi dan peran maskulinitas dan femininitas dalam membingkai pengalaman dalam

ekstremisme kekerasan, penting juga untuk mempertimbangkan bahwa keterlibatan perempuan dan laki-laki dengan konten dan organisasi ekstremis itu sendiri berbeda. Selain itu, ekstremis kekerasan menggunakan propaganda dan pesan online untuk mendukung kepercayaan yang mendorong permusuhan dan kebencian terhadap perempuan yang menciptakan rasa tidak aman di ruang offline, termasuk kekerasan seksual dan berbasis gender.

Berdasarkan tinjauan ini, penelitian ini berupaya mengidentifikasi titik masuk potensial untuk memasukkan pertimbangan gender dan misogini ke dalam kebijakan dan praktik – termasuk dengan penilaian risiko dan dengan mengidentifikasi peran OMS yang dipimpin perempuan dan masyarakat sipil secara umum dalam memperkuat strategi P/CVE yang ada.

METODOLOGI

Studi penelitian ini secara kritis mengkaji titik-titik persimpangan antara ruang online dan offline; khususnya, apakah dan di mana dinamika misoginis dan seksis, yang memantafestasikan dirinya secara online, memperkuat identitas dan ideologi gender di ruang offline, sehingga membenarkan kekerasan dan kepercayaan yang mendorong permusuhan terhadap perempuan. Kami berusaha untuk menyelidiki penguatan ideologi gender yang membahayakan di antara kelompok-kelompok ekstremis kekerasan di kawasan Asia Tenggara, termasuk bagaimana kepercayaan yang mendorong permusuhan dan kebencian terhadap perempuan memengaruhi peran, praktik, dan rekrut-men ekstremis kekerasan.

Mengingat dinamika perubahan ekstremisme kekerasan selama pandemi COVID-19, kami mengkaji bagaimana kepercayaan yang mendorong permusuhan dan kebencian terhadap perempuan ditularkan melalui propaganda, penyebaran misinformasi dan disinformasi dan upaya perekrutan, termasuk yang membenarkan dan melegitimasi kekerasan terhadap perempuan di seluruh kawasan ASEAN.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan metodologi

penelitian yang membumi, interpretivis dan feminis dan pendekatan metode campuran yang dirancang khusus untuk menyelidiki dan menganalisis narasi misoginis dan seksis yang dianut oleh kelompok-kelompok ekstremis.

Studi ini terdiri dari empat tahap kunci. Pertama, para penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap kerangka kebijakan regional ASEAN dan inisiatif nasional yang relevan untuk memahami sejauh mana kebijakan yang ada responsif terhadap dinamika gender ekstremisme kekerasan, termasuk mengatasi peran kebencian dan sikap permusuhan terhadap perempuan. Penelitian ASEAN dan umpan balik dari pemangku kepentingan ASEAN ini menyediakan informasi bagi tim peneliti dan membantu mengembangkan desain instrumen survei. Penelitian kualitatif terdiri dari metode campuran, termasuk metode tradisional seperti wawancara informan kunci dan diskusi kelompok terfokus. Metode dan alat penelitian ini dikembangkan sesuai masukan dari lokakarya awal yang diadakan pada 20 Agustus 2021 melalui Zoom.

Kedua, untuk mempromosikan penelitian yang berorientasi pada tindakan dan partisipatif dan untuk memastikan alat survei responsif terhadap konteks ASEAN, survei disebarluaskan di seluruh kawasan

ASEAN melalui Pusat Gender, Perdamaian dan Keamanan Monash (Monash GPS), organisasi masyarakat sipil Asia Tenggara dan jaringan regional lainnya. Survei dilakukan antara September dan Oktober 2021 dan disebarluaskan di 10 negara ASEAN. Tim peneliti regional kami juga menyebarkan melalui jaringan mereka khususnya di Thailand, Filipina, dan Indonesia, mengidentifikasi para pakar yang dikenal di tingkat nasional, subnasional dan komunitas. Survei dan wawancara dengan informan kunci mengajukan pertanyaan kunci kepada pakar regional tentang ekstremisme kekerasan untuk memastikan apakah sentimen permusuhan yang ada memperparah rasa tidak aman yang dirasakan oleh perempuan.

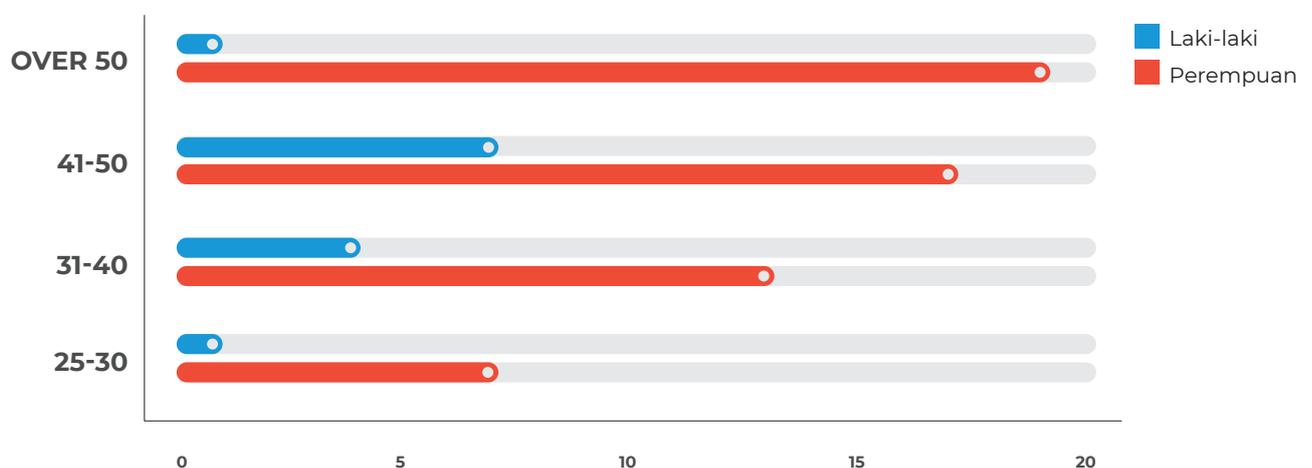
Survei ini tersedia dalam bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Thailand dan Tagalog. Kami menggunakan platform Qualtrics untuk memfasilitasi kemudahan penyebaran survei dan pengumpulan respons yang dapat dilakukan dari beberapa opsi seperti komputer rumah, iPad, atau ponsel. Qualtrics, yang merupakan salah satu platform penelitian yang paling banyak digunakan dapat mendukung pelaksanaan survei skala

besar dan studi yang memiliki desain eksperimental. Kegiatan survei ini dikelola secara online dan respons yang masuk dikumpulkan ke dalam database pusat yang keamanannya dilindungi karena hanya dapat diakses oleh peneliti yang telah ditunjuk.

Platform ini memungkinkan migrasi data secara mudah ke berbagai paket statistik, termasuk ke STATA, paket analisis statistik utama yang akan digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Keterbatasan penelitian ini adalah bahwa kami tidak dapat menerjemahkan survei dalam semua bahasa ASEAN, dan ada bias seleksi karena kami memfokuskan survei di wilayah kawasan yang paling banyak mengalami ekstremisme kekerasan dan terorisme. Namun, melalui jaringan kami, jika memungkinkan, kami menyebarkan survei ke seluruh negara ASEAN.

Penting untuk dicatat keterbatasan studi enam bulan ini. Meskipun survei tersebut disebarluaskan di antara semua negara anggota, mayoritas responden ahli berasal dari Indonesia, Filipina, dan Thailand. Meskipun hal ini dapat dianggap sangat selektif daripada representatif, penting

Gambar 1: Usia menurut jenis kelamin responden



untuk dicatat bahwa Indonesia, Filipina, dan Thailand adalah negara-negara yang terus menghadapi ancaman paling mendesak dari ekstremisme dan konflik kekerasan yang sedang berlangsung.

Ini dengan pengecualian Myanmar. Mengingat situasi dan tantangan politik saat ini yang ditimbulkan oleh COVID-19, selain rentang waktu proyek yang singkat, Myanmar tidak dapat dimasukkan ke dalam cakupan studi ini. Penting juga untuk dicatat bahwa data yang diperoleh dari survei dan wawancara didasarkan pada persepsi para pakar dan informan kunci, yang terlibat dalam pembangunan perdamaian, dan pada strategi P/CVE di seluruh wilayah. Akibatnya, penting untuk mencatat subjektivitas dari tanggapan-tanggapan yang masuk.

Meskipun ada 148 tanggapan ahli yang diterima, hanya 70 yang dianalisis karena survei ini memiliki informasi yang lengkap dan diisi secara keseluruhan. Lima puluh enam responden diidentifikasi sebagai perempuan (80%), 13 diidentifikasi sebagai laki-laki (19%), dan satu responden memilih untuk tidak mengungkapkan jenis kelamin mereka. Sembilan belas peserta adalah perempuan yang berusia di atas 50 tahun (34%), dan 17 orang berusia antara 41 dan 50 tahun (30%). Di antara laki-laki, demografi terbesar adalah tujuh laki-laki berusia antara 41 dan 50 tahun (54%).

Dalam sampel survei, mayoritas responden ahli berasal dari Indonesia (46%), diikuti Filipina (26%) dan Thailand (19%). Enam puluh persen responden mengidentifikasi agama mereka sebagai Islam dan 20% mengidentifikasi diri sebagai Katolik, dengan 47,1% responden dalam sampel mengidentifikasi sebagai "cukup religius" dan 21,4% sebagai "sangat religius".

Survei ini terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama terdiri dari serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan "pesan-pesan bernuansa gender yang disampaikan saat perekrutan" yang disusun dalam skala Likert dari "tidak pernah" hingga "sangat sering" berdasarkan terutama pada hasutan kekerasan oleh aktor ekstremis. Bagian kedua terdiri dari tujuh pertanyaan kualitatif yang meminta responden untuk merefleksikan pengalaman dan pengamatan mereka tentang bagaimana kelompok ekstremis kekerasan meradikalisasi dan merekrut perempuan dan laki-laki secara berbeda, dan bagaimana kepercayaan yang mendorong permusuhan dan kebencian terhadap perempuan dianut. Akhirnya, bagian ketiga terdiri dari serangkaian pertanyaan mengenai "dukungan untuk P/CVE" yang disusun dalam skala Likert dari "sangat tidak setuju" hingga "sangat setuju".

Ketiga, tim peneliti melakukan diskusi kelompok terfokus dan wawancara dengan informan kunci dan para pakar di kalangan pemangku kepentingan ASEAN, dalam format wawancara semi-terstruktur, di negara-negara ASEAN yang telah dipilih sebagai tempat mengeksplorasi survei secara lebih lanjut untuk melihat jaringan ekstremis kekerasan yang diketahui telah ada di tempat-tempat tersebut sebelumnya. Para peserta diminta untuk merefleksikan pengalaman, pengamatan, dan penelitian mereka tentang hubungan antar gender, misogini, dan ekstremisme kekerasan. Diskusi ini dirancang untuk menyelidiki area kontestasi antara perempuan dan sikap permusuhan yang dianut oleh ekstremis kekerasan, termasuk mengidentifikasi bagaimana perempuan "melakukan penolakan" terhadap ideologi gender, kebencian terhadap perempuan dan pandangan

tentang perempuan yang dianut oleh kelompok-kelompok di negara-negara tempat tinggal para peserta.

Wawancara juga mengeksplorasi bagaimana daya tarik maskulinitas yang berbahaya digunakan untuk membenarkan dan melegitimasi kekerasan, dan apakah ada konsistensi antara saluran/situs radikalisme online dan offline dan partisipasi dalam mendukung atau menantang dimensi gender dari ekstremisme kekerasan. Selain itu, tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data sejauh mana COVID-19 telah berdampak pada propaganda, misinformasi, dan

disinformasi baik di ruang online maupun offline, khususnya seperti yang diamati oleh para ahli, praktisi, dan pemangku kepentingan. Wawancara dengan para ahli menginformasikan bagaimana periode ini memungkinkan munculnya peluang baru untuk mempromosikan strategi P/CVE yang responsif gender di seluruh kawasan ASEAN, dan mengidentifikasi tantangan yang dapat diperkirakan terhadap integrasi masalah gender, atau masalah 'Perempuan, Perdamaian dan Keamanan', dalam kebijakan dan praktik P/CVE.

Terakhir, hasil survei dianalisis dengan STATA, dan wawancara ahli dianalisis untuk mentriangulasi tema-tema kunci dengan temuan survei dan tren statistik deskriptif, yang hasilnya disajikan pada bagian berikutnya.

HASIL

1.1 KONTEN INTOLERAN YANG DISEBARKAN SECARA ONLINE

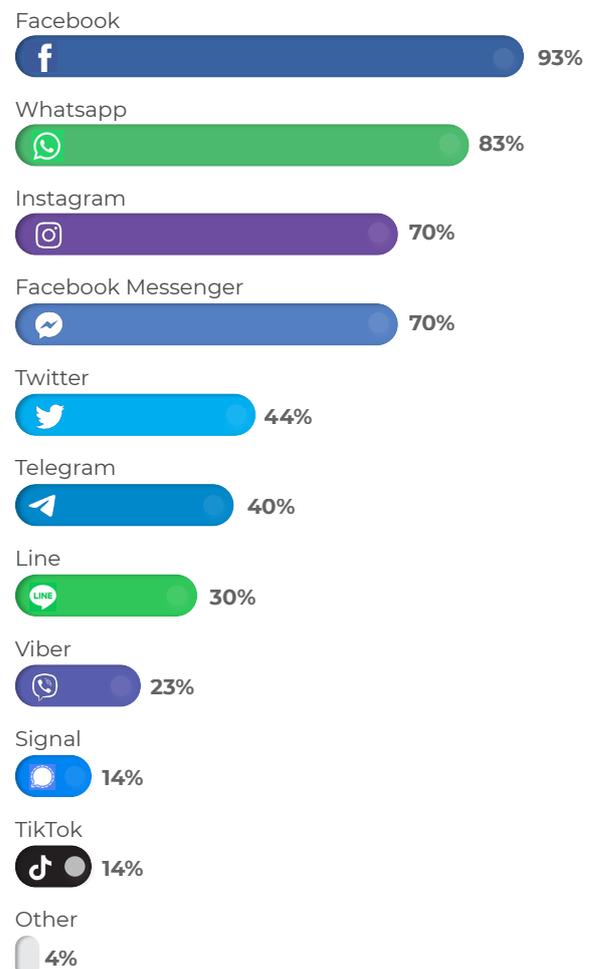
Penelitian kami menunjukkan adanya kekhawatiran yang berkembang bahwa kelompok ekstremis kekerasan di seluruh kawasan ASEAN mendukung dan mengirimkan pesan kekerasan secara online, selain juga memanfaatkan krisis pandemi COVID-19 untuk melakukan radikalisasi, perekrutan dan mobilisasi kepada anggota-anggota kelompok mereka melalui propaganda online.

Survei kami menanyakan kepada peserta tentang penggunaan media sosial, dan sesering apa mereka menemukan konten intoleran yang diposting di media sosial. Facebook adalah platform media sosial yang paling banyak digunakan oleh responden, diikuti oleh WhatsApp dan Instagram. Sebagian besar orang yang disurvei (27,1%) menjawab bahwa mereka menggunakan lima jenis media sosial (baik aplikasi konten dan pesan) dari daftar yang disediakan.

Responden ditanyai tentang seberapa sering mereka mengamati konten intoleran yang diposting di media sosial. Ketika ditanya tentang konten intoleran

yang diposting di media sosial, 44% responden mengidentifikasi bahwa mereka “selalu” atau “sangat sering” melihat konten intoleran, dengan 44% lebih lanjut menyatakan bahwa mereka kadang-kadang melihat konten ini.

Gambar 2: Platform Media Sosial Paling Disukai



Meskipun Twitter bukan salah satu dari tiga platform media sosial teratas yang digunakan dalam sampel, di antara penggunaannya itu adalah platform yang paling banyak mengamati jenis konten ini (61%).

Survei tersebut menanyakan kepada peserta seberapa sering mereka melihat konten media sosial (misalnya postingan, tweet, video) yang mendorong kekerasan terhadap minoritas agama, etnis minoritas, komunitas LGBTI, serta perempuan dan anak perempuan. Empat puluh empat persen responden “kadang-kadang” melihat konten media sosial ekstremis yang mendorong kekerasan terhadap minoritas agama, dengan 31% melihat konten ini “sangat sering”.

Baik laki-laki maupun perempuan mengakui bahwa mereka “kadang-kadang” melihat konten ini di media sosial (masing-masing 62% dan 41%). Indonesia adalah negara tempat sebagian besar responden melihat konten ini “sangat sering” (50%). Saat meruncingkan kategori “selalu” dan “sangat sering”, 41% pengguna Instagram sering melihat konten intoleran, diikuti 36% pengguna WhatsApp dan 34% pengguna Facebook. Di antara pengguna Twitter dalam sampel, 48% telah melihat konten intoleran terhadap minoritas agama.

Ketika ditanya tentang seberapa sering konten media sosial mendorong kekerasan terhadap etnis minoritas, 46% responden “kadang-kadang” melihat jenis konten media sosial ekstremis yang mendorong kekerasan terhadap etnis minoritas sedangkan hanya 27% yang jarang atau tidak pernah melihat konten ini. Perempuan lebih sering melihat konten seperti itu daripada laki-laki (90%), dan Indonesia adalah negara

tempat sebagian besar responden melihat konten ini “sangat sering” (58%). Pengguna Facebook, WhatsApp, dan Instagram mengakui bahwa mereka telah melihat konten ini “sangat sering” (masing-masing 26%, 31% dan 35%).

Tiga puluh sembilan persen responden mengakui bahwa mereka “kadang-kadang” melihat konten media sosial yang mendorong untuk melakukan kekerasan terhadap komunitas LGBTI. Perempuan lebih sering melihat jenis konten ini daripada laki-laki (84%), dan Indonesia adalah negara tempat lebih banyak responden melihat konten ini dengan frekuensi yang lebih tinggi (53% melihat konten seperti itu “selalu” dan “sangat sering”). Peserta survei mengamati konten intoleran yang ditujukan kepada komunitas LGBTI. Misalnya, salah satu peserta dari Filipina mengamati bahwa,

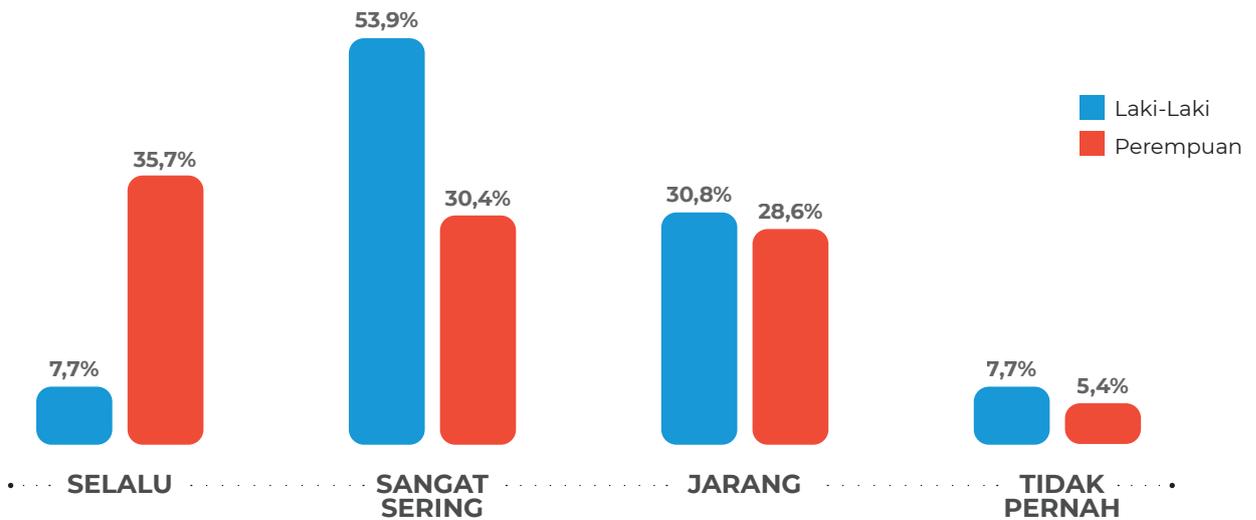


Ada beberapa kasus ketika perempuan dipermalukan di depan umum dan di media sosial setelah mereka dicap sebagai bagian dari komunitas LGBTQ+. Komentar pada posting tentang komunitas tersebut sebagian besar mendukung penghinaan publik terhadap mereka (ketika rambut mereka dipotong) daripada mengutuk tindakan tersebut



Yang memprihatinkan, 31% responden “selalu” dan “sangat sering” melihat konten media sosial ekstremis yang mendorong kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, dan tambahan 34% “kadang-kadang” melihat konten yang mendorong kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Gambar 3: Frekuensi melihat media sosial ekstremis yang mendorong kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan



Lebih dari setengah, atau 55%, responden dari Indonesia dan 27% responden dari Thailand “selalu” atau “sangat sering” melihat konten ini di media sosial, dan perempuan lebih sering mengamati konten ini daripada laki-laki. Sebagian besar pengguna Facebook dalam sampel “jarang” atau “tidak pernah” melihat konten ini di platform, tetapi pengguna WhatsApp dan Instagram lebih sering melihat konten ini (“selalu” dan “sangat sering”) daripada lebih jarang (“jarang” dan “tidak pernah”).

Peserta survei juga ditanya tentang seberapa sering mereka mengamati konten media sosial ekstremis yang mendorong jihad kekerasan: 43% responden mengakui bahwa mereka “kadang-kadang” mengamati konten media sosial ekstremis yang mendorong jenis kekerasan ini, meskipun hanya 16% yang pernah melihat konten ini dengan frekuensi yang lebih tinggi (“selalu” dan “sangat sering”). Di antara responden yang “kadang-kadang” melihat konten yang mendorong jihad di media sosial, sebagian besar berasal dari Filipina.

Sebanyak 46,6% responden dari Indonesia memiliki konten “jarang” atau “tidak pernah melihat” yang mendorong jihad kekerasan online. Namun, ada juga pengamatan yang dilakukan oleh responden survei bahwa jihad kekerasan sebenarnya dijustifikasi berdasarkan dinamika gender. Misalnya, salah satu peserta dari Filipina mengamati postingan Facebook yang mengatakan bahwa Penghapusan Marawi terjadi karena Gubernur sebelumnya adalah seorang perempuan, sehingga Kota tersebut dikutuk oleh Tuhan.

Saat mengelompokkan (grouping) opsi “selalu”, “sangat sering” dan “kadang-kadang” menjadi “ya”, hasil survei mengungkapkan bahwa 77% peserta telah mengamati konten intoleran yang mendorong kekerasan terhadap minoritas agama, dan 73% terhadap etnis minoritas. Konten intoleran yang mendorong kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dan terhadap komunitas LGBTI diamati oleh 66% responden, sedangkan mendorong jihad kekerasan hanya diamati oleh 41% sampel.

Gambar 4: Frekuensi menonton konten intoleran yang mendorong kekerasan di media sosial terhadap kelompok tertentu

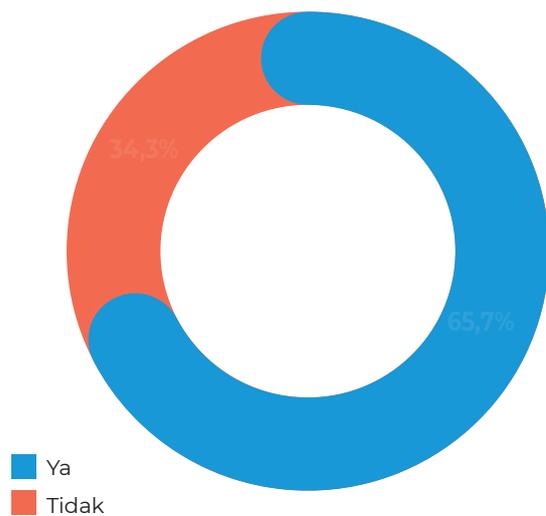


1.2 EFEK KONTEN ONLINE YANG TIDAK TOLERAN DI RUANG OFFLINE

Tiga puluh satu persen responden mengakui bahwa mereka telah mengamati kelompok-kelompok ekstremis kekerasan yang berusaha merekrut anggota melalui media sosial “kadang-kadang” atau “sangat sering”. Dari responden yang telah mengamati konten ini “sangat sering”, 71% berasal dari Indonesia dan 28,6% berasal dari Thailand. Ketika ditanya tentang seberapa sering peserta mendengar kelompok yang mengungkapkan pentingnya laki-laki menemani perempuan saat bepergian ke zona konflik, lebih banyak responden yang mendengar pesan ini dengan frekuensi yang lebih tinggi (“selalu” atau

“sangat sering”, 37,1%) dibandingkan mereka yang pernah jarang atau tidak pernah mendengarnya (34%). Empat puluh enam persen responden dari Indonesia mendengar pesan ini dengan frekuensi yang lebih tinggi, diikuti oleh Filipina (38%) dan Thailand (15%). Saat mengelompokkan pilihan jawaban “selalu”, “sangat sering” dan “kadang-kadang”, 66% responden mengatakan mereka pernah mendengar kelompok menekankan pentingnya perempuan didampingi laki-laki saat bepergian ke daerah-daerah konflik.

Gambar 5: Pentingnya pendamping laki-laki untuk perempuan yang bepergian ke zona konflik



Di bagian kedua survei, dengan menggunakan skala Likert lima poin dari “sangat setuju” hingga “sangat tidak setuju”, para peserta disajikan serangkaian pernyataan tentang betapa khawatirnya mereka tentang konten intoleran yang dianut di ruang offline oleh kelompok ekstremis kekerasan. Sebagian besar responden (77%) setuju (menggabungkan “sangat setuju” dan “setuju”) bahwa mereka khawatir tentang intoleransi di komunitas mereka, terutama responden

dari Indonesia dan Filipina. Hampir semua responden dalam sampel (93%) setuju bahwa mereka khawatir tentang ekstremisme kekerasan di negara mereka. Ini tampaknya menjadi perhatian umum di antara laki-laki dan perempuan karena 85% laki-laki dan 95% perempuan setuju bahwa mereka khawatir.

Secara signifikan, 89% responden setuju bahwa ekstremisme agama akan menghambat hak-hak perempuan. Setengah dari peserta di Indonesia setuju bahwa mereka khawatir bahwa ekstremisme agama akan menghambat hak-hak perempuan, 27% di Filipina dan 16% di Thailand. Baik laki-laki (84,6%) dan perempuan (89,2%) menyatakan keprihatinan mereka tentang masalah ini. Selanjutnya, 91% responden setuju bahwa ekstremisme agama memprioritaskan hak laki-laki di atas hak perempuan – 93,1% perempuan sangat setuju dengan pernyataan tersebut dibandingkan dengan 6,90% laki-laki.

Sebagai contoh, salah satu narasumber dari Indonesia mengamati bahwa ajaran ekstremisme telah masuk ke sekolah-sekolah, seperti sekolah menengah atas, dan juga sudah mulai merambah organisasi kemahasiswaan. Dia mengamati bahwa ajaran “disebarkan dari Timur Tengah, membawa ajaran misoginis terhadap perempuan sebagai bagian dari strategi penaklukan mereka”. Dia mengakui bahwa itu adalah bagian dari strategi organisasi di mana perempuan tampak diberdayakan:

“Namun, ini hanya manipulasi; di balik itu adalah praktek misogini, kesadaran perempuan, tubuh dan pikiran mereka dikendalikan, meskipun mereka terlihat kaku

dan militan-tugas mereka adalah melayani. Mereka militan karena iming-iming surga. Mereka (perempuan yang tergabung dalam organisasi jihad/ekstrimis) tampak aktif menjalankan agenda tersebut, namun tidak didasari oleh kesadaran mereka. Ini hanya penaklukan karena mereka aktif dalam politik dan menjalankan agenda, bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk organisasi.”

Seorang peserta dari Filipina menceritakan bahwa:

“Facebook telah terbukti menjadi alat yang efektif, terutama di dunia saat ini, saat Facebook identik dengan ‘Internet’ bagi kebanyakan orang. Saya selalu melihat komentar misoginis dan seksis terhadap perempuan, terutama dari teman-teman yang menyebut diri mereka sebagai ‘penganut’ Islam yang religius dan ketat. Pelecehan juga muncul di kolom komentar dari mereka yang disebut sebagai teman, terutama membicarakan tentang kemampuan perempuan dalam memimpin. Mayoritas individu Muslim ortodoks umumnya setuju bahwa perempuan tidak berhak untuk menjadi pemimpin atau memegang jabatan publik tertinggi – baik dalam lingkungan negara atau universitas.

“Banyak orang berdebat dengan saya karena hadits (ucapan, perbuatan, atau pengakuan yang datang dari) tentang kepemimpinan perempuan yang mengatakan: ‘Suatu pengaruh-nya yang

memiliki seorang perempuan sebagai pemimpin tidak akan pernah makmur'. Di sisi lain, perdebatan tentang hak-hak perempuan dan Islam seringkali dipolitisasi dan diwarnai oleh stereotip. Mereka mengambil bagian-bagian dengan nada misoginis yang terang-terangan di luar konteks dan menggunakannya untuk mendukung klaim mereka. Salah satu masalah yang lebih besar adalah gerakan keagamaan cenderung melihat teks sebagai dokumen statis yang tidak dapat direvisi dari waktu ke waktu."

Peserta lain dari Filipina menulis bahwa:

"Terlalu sering, sebagian besar laki-laki religius yang saya kenal, yang menjalankan dan mengkhotbahkan agama mereka, memiliki pandangan seksis dan misogynis terhadap perempuan. Sebagai seorang feminis, pekerjaan hidup saya telah dibentuk oleh keyakinan bahwa agama dan budaya tidak boleh digunakan untuk membenarkan penindasan terhadap perempuan".

Secara komparatif, 93% perempuan "sangat setuju" bahwa mereka khawatir akan kepercayaan yang mendorong permusuhan dan kebencian terhadap perempuan yang dianut oleh kelompok ekstremis mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan dibandingkan dengan 7% laki-laki. Delapan puluh enam persen dari mereka yang disurvei setuju bahwa ada hubungan erat antara apa yang dianut secara online oleh kelompok-kelompok

ekstremis yang kejam dan pengaruhnya terhadap perilaku offline. Yang memprihatinkan, hampir semua responden dalam sampel setuju (94%) dengan fakta bahwa konten intoleran yang diposting online berbahaya bagi perempuan di ruang offline. Semua laki-laki dalam survei setuju dengan pernyataan itu, seperti halnya 93% perempuan.

Wawancara dengan informan kami memberikan wawasan yang lebih dalam tentang implikasi hubungan antara perilaku online dan offline. Di Indonesia, hubungan antara dinamika online dan offline diakui di antara para peserta. Seorang yang diwawancarai dari Indonesia berbicara tentang kasus Zakiah Aini "ZA"²⁷ yang menembaki petugas di markas besar kepolisian nasional. Sebelum menyerbu markas, "ZA" telah memposting surat wasiatnya di Instagram yang menunjukkan bagaimana dia terjerumus dalam ide-ide online yang disebarkan melalui propaganda online oleh sebuah kelompok jihad.

Lebih lanjut, seorang yang diwawancarai dari Indonesia menjelaskan bahwa:

"Kampanye poligami di media sosial juga cukup berpengaruh terhadap tren sosial di kalangan kelompok hijrah. Narasi pro-poligami biasanya dibahas sejalan dengan narasi konservatisme gender, seperti peran perempuan hanya di ranah domestik, kontrol tubuh perempuan, dan narasi agama digunakan untuk merendahkan perempuan.

Kampanye konservatisme gender di media sosial mempengaruhi tindakan di dunia nyata. Misalnya, (kita lihat ini) munculnya

” pendampingan offline poligami, gerakan migrasi besar-besaran dan tren kekerasan terhadap perempuan berkedok guru spiritual.

Ketika ditanya secara khusus tentang apakah mereka khawatir bahwa kelompok ekstremis kekerasan mendukung kepercayaan yang mendorong permusuhan dan kebencian terhadap perempuan, 87% responden ahli setuju, di antaranya lebih dari separuh responden berasal dari Indonesia (51%). Delapan puluh dua persen perempuan dan 16% laki-laki setuju bahwa mereka khawatir.

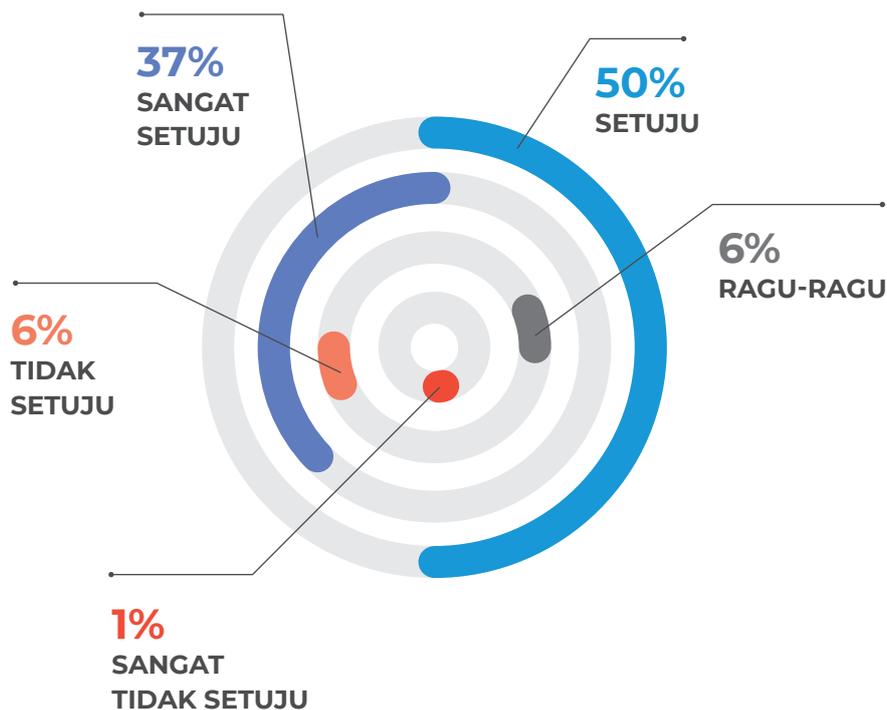
Sebagaimana terungkap dalam tanggapan kualitatif di bagian ketiga survei, sebagian besar pandangan seksisme dan misoginis ditemukan ketika membicarakan tentang peran perempuan dalam

masyarakat dan cara perempuan berpakaian dan berperilaku. Misalnya, seorang peserta dari Filipina mengamati bahwa:

“Keluarga di Lanao del Sur, terutama yang beragama Islam, sangat patriarkis. Di dalam rumah mereka, perempuan selalu dilihat sebagai “ibu rumah tangga”, tidak lebih, tidak kurang. Al-Qur’an secara eksplisit memerintahkan perempuan untuk tinggal di rumah mereka. Saya telah melihat banyak posting seperti ini, mengutip ayat Al-Qur’an tersebut untuk membatasi perempuan di rumah mereka”.

Seorang peserta dari Indonesia mengamati sebuah kelompok ekstremis yang “sangat mengkritik cara perempuan berpakaian

Gambar 6: Reaksi responden terhadap pernyataan, “Saya prihatin bahwa kelompok ekstremis kekerasan mendukung kepercayaan yang mendorong permusuhan dan kebencian terhadap perempuan.”



dan bagaimana mereka harus mematuhi apa yang dianggap tepat oleh suami melalui gambar dengan komentar". Peserta lain dari Filipina mengamati bahwa "ekstremis mendorong perempuan untuk bergabung dengan gerakan ekstremis dengan membuat mereka percaya bahwa mereka akan lebih berdaya sebagai seorang perempuan dan pada saat yang sama menjadi hamba Allah yang lebih baik jika mereka mendukung ideologi dan keyakinan para ekstremis ini."

Seorang yang diwawancarai dari Indonesia menceritakan bahwa,

“Saya ingat suatu momen dengan diusungnya RUU Pemberantasan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) yang kerap menjadi trending topic. Ini segera menimbulkan kritik keras, terutama dari kelompok radikal Islam, dengan alasan bahwa undang-undang tersebut adalah produk feminisme barat dan akan sangat membebaskan perempuan. Celakanya, seorang dosen muslimah menyampaikan salah satu kritik di Instagram dan Facebook dengan mengajak masyarakat menandatangani petisi untuk menonaktifkan proses pengesahan RUU tersebut. Dia memalsukan RUU seolah-olah mendukung seks bebas, aborsi legal dan prostitusi legal. Akhirnya, postingan tersebut ditarik dan dianggap hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Sementara itu, sebagian besar masyarakat masih mengingat video di Instagram tentang aturan jilbab paksa bagi siswa

perempuan non-Muslim di sebuah sekolah menengah kejuruan negeri di Padang, Sumatera Barat. Terlepas dari klarifikasi kepala sekolah terhadap video tersebut, peristiwa ini menunjukkan pelanggaran hak beragama orang Indonesia yang dijamin secara hukum dalam UUD 1945.”

Lebih lanjut, seorang pembela HAM untuk korban konflik dari Thailand selatan mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa:

“Komunitas Muslim di sini tidak memperhatikan apa yang kita kenakan atau dengan siapa kita pergi keluar. Tapi saya juga dikritik oleh orang-orang itu, seperti yang Anda lihat di media dan berita, yang tidak suka melihat perempuan mempertanyakan peran pemerintah. Mereka tidak ingin melihat orang-orang berdiri dan memperjuangkan hak-hak sipil dan keadilan. Mereka menggambar karikatur saya dan menuduh saya mengambil sikap separatis... dan melakukan pengkhianatan terhadap Thailand. Mereka bilang saya musuh nasional. Saya harus diusir dari negara ini.”

Hal ini dikuatkan oleh narasumber lain dari Thailand Selatan yang menjelaskan bahwa:

“Masih ada beberapa isu yang sangat menentang agensi dan partisipasi perempuan sebagai pemimpin, yaitu dalam organisasi berbasis agama, dan dalam konteks ini, perempuan tidak

” memiliki banyak ruang untuk berbicara dan berpikir secara berbeda. Dalam hal pengambilan keputusan dalam berbagai dimensi, ternyata menjadi tugas laki-laki lagi. Jadi, ini bukan keseimbangan harga diri perempuan, hak untuk bekerja, meskipun perempuan tetap harus bekerja keras untuk membantu keluarga mendapatkan penghasilan.”

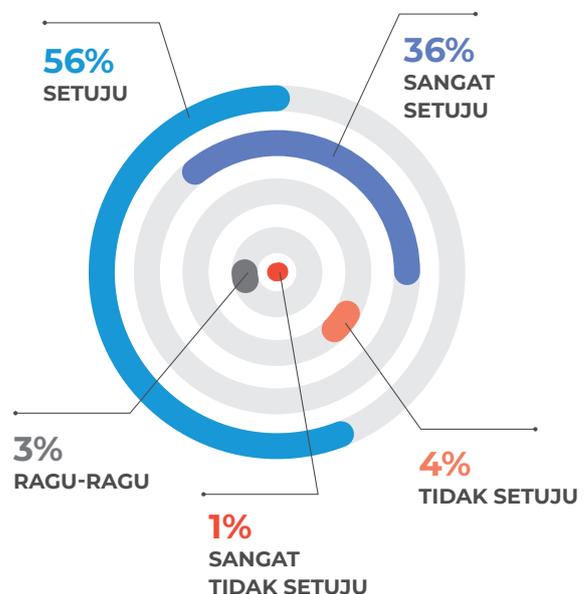
Menariknya, bagaimanapun, keyakinan misoginis dan permusuhan yang dianut oleh kelompok ekstremis juga dapat mempengaruhi dinamika intrakelompok. Misalnya, seorang narasumber dari Indonesia menceritakan dari pengamatannya sendiri pada tahun 2009 bahwa ada kasus seorang perempuan yang terlibat dalam Jemaah Islamiyah (JI) yang rela menawarkan dirinya sebagai pelaku bom bunuh diri, namun ditolak oleh Noordin M Top karena “jarang perempuan di Indonesia melakukan tindakan semacam ini”, bahwa itu “bukan dunia perempuan”, dan bahwa tindakan seperti itu “tidak hanya dilarang dalam Islam tetapi juga menurut hukum organisasi JI”.

Ketika ditanya apakah kepercayaan yang mendorong permusuhan dan kebencian terhadap perempuan yang dianut oleh kelompok ekstremis mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan, hampir semua responden dalam sampel (91,4%) setuju bahwa mereka prihatin, yang menyajikan temuan dan korelasi yang sangat jelas. Lima puluh persen yang setuju dengan pernyataan tersebut berasal dari Indonesia dan 27% dari Filipina. Ini adalah kekhawatiran umum di antara laki-laki dan perempuan karena 92,3% laki-laki dan 91,1% perempuan setuju bahwa mereka khawatir.

Seorang yang diwawancarai dari Indonesia mengamati bahwa:

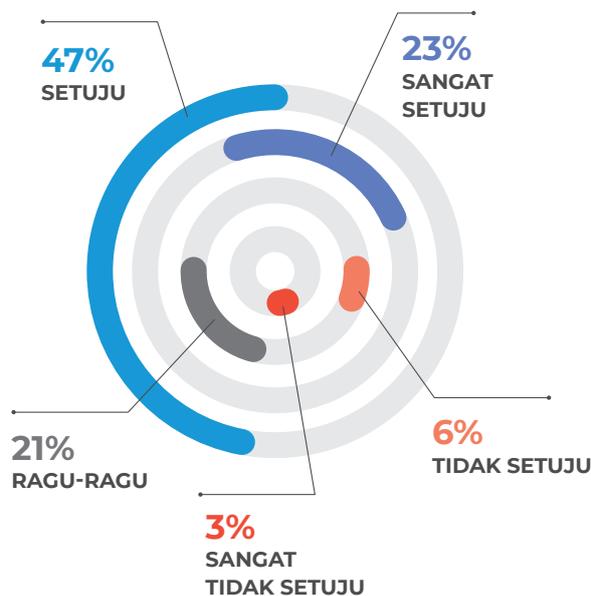
“Bagi saya, kelompok konservatif, intoleran, dan ekstremis bersatu dalam membenci ideologi kesetaraan gender. Tidak ada kelompok ekstremis yang mendukung ideologi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki... dalam konteks bentuk dan strategi naratif, (kelompok) ekstremis kekerasan selalu melihat perempuan sebagai penyelamat, atau penyebab kondisi yang dianggap tidak ideal secara moral. Misalnya, dalam isu-isu yang berkaitan dengan kekerasan seksual, kelompok ekstremis akan selalu mengaitkan penyebab semua tindakan kekerasan dengan atribut dan pakaian perempuan. Beberapa contohnya adalah narasi intoleran yang muncul ketika menanggapi komentar (aktris) Nikita Mirzani tentang Habib Rizieq, serangan verbal pun terjadi bahwa perempuan adalah neraka dengan wacana yang melibatkan kata-kata makian yang berkaitan dengan bagian tubuh perempuan.”

Gambar 7: Reaksi responden terhadap pernyataan “Saya khawatir bahwa kepercayaan yang mendorong permusuhan dan kebencian terhadap perempuan yang dianut oleh kelompok ekstremis mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan.”



Selama pandemi COVID-19, 70% responden setuju bahwa radikalisme online dan proliferasi propaganda ekstremis meningkat. Secara keseluruhan, 76,9% dan 92,9% perempuan setuju dengan pernyataan tersebut.

Gambar 8: Pandangan responden terhadap pernyataan, “Radikalisme online dan proliferasi propaganda ekstremis telah meningkat selama COVID-19”.



Seorang yang diwawancarai dari Indonesia mencatat bahwa:

“COVID telah berhasil membatasi pertemuan langsung untuk menyebarkan propaganda, informasi yang salah, dan disinformasi melalui sebagian besar pembatasan skala besar pemerintah untuk mencegah penyebaran virus. Namun kecenderungan pemanfaatan ruang online untuk menyebarkan ini semakin meningkat karena penggunaan aktivitas online bersifat wajib di berbagai sektor, seperti pekerjaan dan pendidikan. Kebanyakan orang pasti menggunakan

platform online untuk menyebarkan informasi palsu mengenai pandemi, serta ide-ide radikal yang ditargetkan pada orang-orang, termasuk merekrut mereka sebagai bagian dari kelompok.”

Orang lain yang diwawancarai dari Indonesia mengamati bahwa:

“(Berdasarkan pengalaman saya), selama 2020-2021 salah satu hal yang menarik adalah dampak misinformasi dan disinformasi terkait COVID, yang mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat dalam menyikapi, mencegah dan menanganinya (virus). Pada awal pemerintah Indonesia menetapkan aturan untuk membatasi kegiatan keagamaan di tempat ibadah, isu ini menimbulkan reaksi keras dan negatif di kalangan kelompok ekstremis, sehingga memunculkan narasi bahwa pemerintah membenci Islam. Hal ini berdampak pada reaksi masyarakat tradisional dan konservatif yang menyebabkan mereka tidak mempercayai kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID.”

Lebih lanjut, 80% responden setuju bahwa COVID-19 telah mengakibatkan ketidakamanan yang lebih signifikan bagi perempuan yang terkena dampak ekstremisme kekerasan. Misalnya, di Poso, Indonesia, setidaknya telah terjadi empat aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Ali Kalora, di Gunung Biru selama masa pandemi COVID-19 (IPAC, 2020b:5-6). Istri narapidana terorisme, yang ditahan dan mereka yang menjanda

karena suaminya meninggal akibat kegiatan ekstremisme kekerasan, adalah yang paling terkena dampaknya. Kedua kelompok perempuan telah menjadi sasaran dan dieksploitasi oleh laki-laki untuk mendukung atau mengambil bagian dalam tindakan ekstremisme.

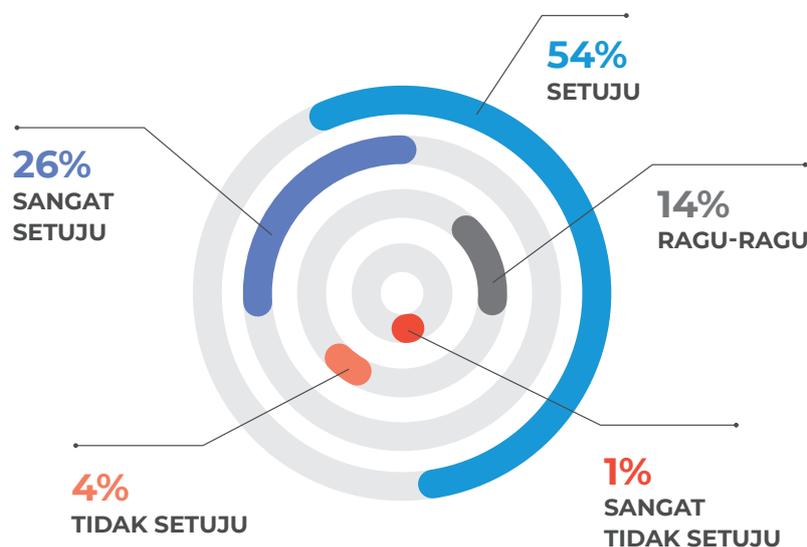
Selain itu, propaganda yang mengaitkan karisma dan kepahlawanan maskulin dengan tindakan teroris dipromosikan secara online dan selama upacara pemakaman teroris di wilayah ini secara offline. Para pemuda didorong untuk berbaris ke kuburan untuk mengambil bagian dalam upacara yang maskulin ini. Wawancara dengan para ahli menunjukkan bahwa upaya untuk mencegah peran maskulin negatif dan propaganda oleh perempuan merupakan tantangan, dan organisasi perempuan memerlukan dukungan yang lebih besar untuk menjangkau para perempuan ini. Mencegah lebih banyak perempuan memasuki lingkaran ekstremisme bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga organisasi masyarakat sipil, yang mungkin lebih efektif dalam konteks sensitif ini.

Survei tersebut juga menanyakan tentang kembalinya kekuasaan Taliban baru-baru ini di Afghanistan pada Agustus 2021, mengingat kebetulan survei tersebut, termasuk pandangan yang dianut oleh kelompok-kelompok ekstremis Asia Tenggara secara online. Delapan puluh persen responden setuju bahwa kembalinya Taliban di Afghanistan telah meningkatkan risiko ekstremisme kekerasan dan sikap permusuhan dan misoginis terhadap perempuan yang dianut oleh kelompok. Lebih dari separuh responden ini (52%) berasal dari Indonesia.

1.3 Rekrutmen berdasarkan gender

Seperti yang disebutkan sebelumnya, survei kami menanyakan kepada peserta seberapa sering mereka secara langsung mengamati kelompok ekstremis kekerasan yang berusaha merekrut anggota melalui media sosial. Sebanyak 68,6% responden “jarang” atau “tidak pernah” melihat upaya ekstremis untuk merekrut individu secara terbuka melalui

Gambar 9: Pandangan responden terhadap pernyataan, “COVID-19 telah mengakibatkan ketidakamanan yang lebih besar bagi perempuan yang terkena dampak ekstremisme kekerasan.”



platform online, dengan hanya 31,4% yang hanya mengamati konten ini “kadang-kadang” atau “sangat sering”. Responden yang mengamati konten ini “sangat sering” berasal dari Indonesia (71,4%) dan Thailand (28,6%).

Frekuensi pengamatan yang lebih rendah ini tidak mengejutkan, karena peserta dalam wawancara kami (termasuk satu peserta dari Malaysia yang bekerja di bidang ini) mendokumentasikan dan mengamati bagaimana kelompok ekstremis yang kejam cenderung merekrut secara diam-diam melalui aplikasi pesan, atau setelah mengembangkan hubungan dan kepercayaan dengan calon anggota dari waktu ke waktu. Namun, beberapa responden berkomentar tentang bagaimana mereka mengamati perekrutan ke dalam kelompok-kelompok ekstremis yang kejam. Misalnya, seorang peserta dari Indonesia mengamati bahwa “kelompok-kelompok ekstremis yang kejam akan mencoba menjodohkan perempuan yang belum menikah dengan laki-laki yang memiliki pengetahuan dan komitmen agama yang kuat sehingga para perempuan ini dapat dilindungi. Kelompok VE akan menawarkan calon pasangan bagi laki-laki yang belum menikah, atau bagi mereka yang sudah menikah, mereka dapat memperoleh istri lain”.

Seorang narasumber dari Indonesia menjelaskan bahwa dari pengamatan mereka, partisipasi perempuan dalam ekstremisme kekerasan juga berbeda antar organisasi, yang mereka amati ketika mengkaji JI dan ISIS. Mereka mengamati:

““Pengawal lama JI masih menganggap seorang perempuan se-

bagai kaum yang sudah selamanya bertugas untuk melahirkan anak – hanya untuk tujuan biologis. Mereka memiliki pola pikir yang sangat tradisional. Dalam hal ini, baik peran perempuan dalam ekstremisme kekerasan maupun viktimisasi perempuan, dalam kaitannya dengan JI, tidak terlalu terasa. Perempuan masih digunakan (secara strategis) secara tradisional, baik untuk tujuan perkawinan silang strategis untuk melahirkan anak, atau sebagai aksesori ekstremisme kekerasan, dimana mereka menyembunyikan suami mereka atau menyimpan rahasia organisasi...(tetapi) di ISIS- grup terkait, Telegram mereka lebih hidup. Mereka memiliki diskusi kelompok fokus sendiri di Telegram tentang peran perempuan, yang sangat aktif antara 2017 hingga 2019.

“Sangat berbeda, di Indonesia, peran perempuan sebagai pelaku lebih menonjol. Viktimisasi terhadap perempuan juga menjadi lebih jelas. Di grup-grup Telegram mulai saling tuding mata-mata, mulai saling ancam...kini dinamikanya sama seperti grup-grup yang dulu didominasi laki-laki, atau eksklusif laki-laki. Sekarang mereka menggunakan bahasa yang sama (seperti laki-laki) ketika mereka berbicara tentang “jasus”, siapa yang memata-matai siapa, dan kemudian mengancam akan membunuh mereka. Jadi saya pikir itu adalah dua dinamika yang berbeda.”

Peserta lain dari Filipina mengamati bahwa:

“Perempuan adalah perekrut langsung; mereka tahu bagaimana melibatkan orang melalui diskusi; mereka memilih perempuan yang menarik untuk merekrut perempuan lain karena mereka memahami kebutuhan mereka dan menggunakan bahasa persuasif yang efektif dalam memberdayakan perempuan. Perempuan yang diberdayakan memimpin orang, tetapi pemberdayaan berarti membawa senjata seperti laki-laki dan meneriakkan ‘Allahu Akbar’”.

Mengomentari penelitian mereka tentang Aceh, seorang narasumber dari Indonesia juga berbicara tentang bagaimana keterlibatan dalam kelompok militan dapat dilihat sebagai bentuk pemberdayaan. Dia berbicara tentang bagaimana perempuan yang belum menikah dapat dengan mudah berpartisipasi dalam gerakan, karena mereka tidak memiliki hal-hal yang perlu dikhawatirkan, atau anak-anak untuk diurus. Namun, ia juga menyebutkan bahwa ide menjadi pelindung keluarga, komunitas atau bangsa dapat menarik perempuan untuk berpartisipasi dan berfungsi sebagai “faktor penarik”.

Ia mencontohkan bahwa perempuan dalam kategori ini lebih suka mengadopsi peran yang lebih maskulin, termasuk dalam ruang keagamaan. Dia mencatat bahwa, “ketika saya berbicara dengan pejuang perempuan di Aceh, mereka mengatakan bahwa mereka senang bergabung dengan gerakan dimana mereka dapat membawa senjata dan

mengenakan seragam. Mereka merasa seperti laki-laki dalam arti bahwa mereka dapat membawa keamanan bagi masyarakat”.

Tetapi peserta lain dari Filipina mencatat bahwa mereka telah mengamati “propaganda penghilangan palsu atau pelecehan terhadap perempuan Muslim di wilayah non-Muslim untuk membuat seolah-olah ada pelecehan dan diskriminasi untuk mendapatkan simpati dari calon target perekrutan”, dan “di Lanao del Sur narasi ekstremis kekerasan mereka adalah bahwa perempuan Muslim kami sebelumnya diperkosa dan dibunuh oleh personel keamanan Filipina”. Ini adalah pola umum saat ancaman ketakutan dan/atau laporan kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender yang tidak diverifikasi digunakan oleh kelompok-kelompok ekstremis yang kejam untuk meradikalisasi dan mendapatkan simpati untuk tujuan mereka.²⁸

Namun, baik responden survei ahli maupun yang diwawancarai mengamati hubungan antara propaganda online dan mekanisme radikalisisasi, dan bagaimana hal ini dimanifestasikan di ruang offline.

Seorang yang diwawancarai dari Indonesia menguraikan bagaimana mereka telah mengamati kelompok-kelompok ekstremis kekerasan yang mencoba meradikalisasi perempuan dan laki-laki secara berbeda, dan bagaimana ini diterjemahkan secara offline:

“Mereka meradikalisasi dan merekrut perempuan dan laki-laki, termasuk kaum muda, dengan berbagai cara. Di masa lalu, mereka biasa merekrut mereka dengan mengundang

mereka ke beberapa khotbah dengan pengajian Al-Qur'an secara berkelompok. Khotbah-khotbah tersebut berisi nasehat-nasehat yang relevan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam menegakkan hukum Allah di dunia, dimulai dari diskusi membandingkan negara dan hukum Allah dan perlunya komitmen serius terhadap hukum Allah di semua bidang kehidupan, berdasarkan Al-Qur'an. Ini akhirnya mengarah pada jihad dalam hal memerangi kelompok agama yang berbeda atau orang-orang Muslim yang cenderung tidak menegakkan hukum-hukum Allah dan Al-Qur'an...

“(namun), era digital membawa lagi tren radikalisme baru dengan merekrut anggota baru melalui media sosial. Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp adalah jenis media sosial yang digunakan oleh kelompok ekstremis paling kejam untuk berbagi ide agama radikal mereka. Jejaring media ini berpotensi mengekspos anak muda secara dominan dengan berbagi ide yang disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari mereka, misalnya isu pacaran (ya atau tidak), relasi ideal antara laki-laki dan perempuan. Pada akhirnya, tujuan mereka adalah memperkenalkan anak muda untuk terlibat secara radikal dengan berpartisipasi dalam kelompok ekstremis nyata, seperti ISIS. Mereka diperkenalkan dengan citra kehidupan yang sempurna di bawah sistem Khalifah (Kekhalifahan) mengenai ekonomi dan perbaikan kehidupan lainnya”.

Orang yang diwawancarai lainnya memberikan contoh spesifik tentang bagaimana perempuan dalam satu organisasi ekstremis menyebarkan ajaran mereka baik secara online maupun melalui rekrutmen di tempat sebagai bagian dari agenda gerakan. Dia menjelaskan bahwa:

“Mereka memulainya dengan kegiatan promosi pemberdayaan ekonomi kecil untuk perempuan. Setelah itu, pengajian agama (Quran) didirikan, keanggotaan dibuat. Mereka disambut dengan bacaan-bacaan ini, yang terkadang ditambahkan kegiatan anak-anak seperti mewarnai. Akhirnya para orang tua bersimpati dan jatuh cinta pada hal tersebut, mereka bergabung dengan kelompok pengajian dan juga segera mengirimkan anak-anaknya untuk mengikuti pengajian.

1.4 Perselisihan dan Perlawanan

Studi ini memiliki beberapa bukti tentang bagaimana perempuan dan laki-laki melawan ekstremisme kekerasan dan bagaimana perempuan mengatasi atau melakukan perlawanan secara berbeda dengan laki-laki.

Dalam sebuah wawancara dengan seorang pakar Indonesia, disebutkan bahwa beberapa perempuan muda telah bergabung dalam upaya kolektif untuk membahas dan merenungkan bagaimana ideologi ekstremis yang kejam telah mengubah perilaku individu, yang mengarah pada pengucilan mereka dari orang-orang dengan latar belakang agama atau budaya yang berbeda. Forum diskusi ini telah menciptakan ruang baru bagi perempuan muda untuk secara kritis

mengkaji pertanyaan dan keprihatinan mereka tentang Islam dan hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki, dan juga untuk membahas topik sehari-hari seperti film dan fashion.

Para pemimpin perempuan telah mendorong kembali ideologi ekstremis kekerasan melalui pendekatan programatis Wahid Foundation terhadap toleransi beragama. Pendekatan ini mempromosikan nilai-nilai kesetaraan gender melalui organisasi siswa sekolah menengah yang melibatkan siswa laki-laki dan perempuan anggota "Rohis" atau "Rohani Islam" ("The Spirit of Islam").

Di tingkat masyarakat di Indonesia, program Desa Damai bertujuan untuk memutus mata rantai radikalisme melalui pemberdayaan ekonomi dan pendidikan masyarakat. Enam belas 'Desa Damai' di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat melatih anggota masyarakat untuk membuat sistem deteksi dini sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama dapat menilai potensi radikalisme di lingkungan mereka. Mereka berupaya membangun ruang dialog yang inklusif gender antar anggota masyarakat dan menciptakan sikap saling toleransi terhadap sesama anggota masyarakat. Masing-masing dari 16 Desa Damai telah membentuk mekanisme untuk mendeteksi dan merespon sejak dini ancaman konflik sosial di masyarakat, terutama yang terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pencegahan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme kekerasan.

Kerentanan perempuan terhadap konservatisme agama dan rekrutmen oleh kelompok ekstremis ditantang secara diskursif melalui konsep "Muslimah Reformis" yang dikemukakan oleh

Profesor Musdah Mulia. Ini merupakan perkembangan penting yang berpotensi menumbuhkan partisipasi perempuan dalam peran P/CVE. Dalam bukunya, *"The Encyclopedia of Reformed Muslim Women: Points of Thought for Reinterpretation and Action,"* Musdah Mulia menekankan bahwa perempuan muslim tidak cukup menjadi moderat, mereka juga harus menjadi aktor progresif, terlibat dalam mempromosikan perdamaian dan pencegahan konflik.

Konsep ini mengacu pada ajaran tentang kepemimpinan perempuan Tauhid dalam hukum dan sejarah Islam yang melampaui keibuan dan menghubungkan feminisme dengan Islam. Dalam pandangan Musdah Mulia, perempuan muslim tidak boleh terpaku pada simbol-simbol Islam karena identitas keagamaan cenderung dimanfaatkan oleh oportunist politik dan ekonomi. Secara politis, simbol-simbol yang merupakan bagian dari identitas agama sering digunakan untuk mendapatkan dukungan massa yang dapat mengarah pada tindakan intoleransi, sedangkan secara ekonomi simbol-simbol tersebut dapat dikomodifikasi dan dieksploitasi oleh kapitalis atas nama agama. Dari perspektif ini, Musdah Mulia menganjurkan bahwa aktivisme perempuan muslim harus didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia, demokrasi dan agama.

Seorang perempuan yang diwawancarai dari Indonesia menceritakan bahwa:

“Kelompok perempuan memiliki berbagai strategi untuk melawan ideologi misoginis. Komunitas muslim dan penduduk perkotaan telah muncul mencoba membangun kampanye naratif alternatif dengan perspektif kesetaraan gender dan ideologi agama yang lebih inklusif.

Di sisi lain, ada juga kesadaran di kalangan organisasi keagamaan moderat tentang optimalisasi ruang pertemuan sektoral untuk mengangkat isu kesetaraan dan 'Islam bersahabat'. Namun demikian, tantangan di kalangan kelompok moderat adalah mengangkat narasi Islam moderat dengan secara khusus menysasar kelompok perkotaan.

"Kampanye Islam inklusif melawan kelompok ekstremis masih bersifat primordial/sektoral. Namun, penting juga bahwa anak muda saat ini cukup mandiri dan tidak mau berafiliasi dengan ormas tertentu. Contoh munculnya gerakan perlawanan narasi misoginis dari komunitas Islam adalah melalui (program) seperti Muslimah for Change, Muslimah Reformis, Mubadalah, Bincangmuslimah, Muslimah Feminis, dan lain-lain".

Salah seorang laki-laki yang diwawancarai, seorang advokat literasi digital dan pakar dari organisasi keagamaan moderat, menegaskan bahwa pemuda muslim moderat di Indonesia, yang telah bergabung dengan pondok pesantren moderat, pada dasarnya 'kebal' terhadap ideolog agama ekstrem, mencatat bahwa ini karenasiswa belajar dengan ulama yang tidak membenarkan ekstremisme. Dia juga percaya bahwa, pada kenyataannya, mayoritas muslim di Indonesia adalah moderat, dan mempraktikkan sikap beragama yang moderat penting untuk melawan ekstremisme:

“

"Dalam konteks Indonesia, masyarakat Indonesia memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap domestikasi perempuan.

Mengapa? Karena sejak kecil mereka hidup dalam lingkungan yang moderat, budaya yang lebih terbuka: mereka melihat ibu mereka bekerja, berkarir seperti dokter, guru, petani, artinya mereka sudah mendarah daging dalam perspektif gender yang lebih egaliter. Oleh karena itu, kelompok ekstrimis konservatif perlu melakukan "upaya ekstra" untuk mengubah/mempengaruhi kaum muda Indonesia."

Para pakar dari Filipina yang berpartisipasi dalam penelitian ini berbagi informasi yang menjanjikan tentang keterlibatan dengan perempuan dalam Kelompok Abu Sayyaf (ASG), dan bagaimana perempuan berpartisipasi dalam ekstremisme kekerasan, baik sebagai penganut sejati ideologi dan kerabat, dan semakin menentang ekstremisme kekerasan sebagai jalan bagi keluarga dan masyarakat mereka. Program komunitas dengan janda ASG bertujuan untuk mengatasi pendorong partisipasi perempuan dengan memberikan pelatihan pemberdayaan dan keterampilan kepemimpinan bagi 40 janda ASG secara khusus, bekerja sama dengan militer. Sebagai hasil dari program yang disesuaikan, jumlah ekstremis kekerasan yang menyerah telah meningkat menjadi lebih dari 300 di wilayah Sulu.

1.5 Kebijakan-kebijakan P/CVE yang ada

Studi kami juga menanyakan apa yang telah kami pelajari sejauh ini dari upaya regional dan nasional dalam mempromosikan dan menerapkan P/CVE di Negara-negara Anggota ASEAN, dan apa yang menjadi pencapaian dan

tantangan utama. Seperti disebutkan sebelumnya, pencapaian utama di antara beberapa Negara Anggota – khususnya Indonesia dan Filipina, adalah komitmen dan implementasi RAN dalam mencegah dan melawan ekstremisme kekerasan. Juga terbukti bahwa Negara-negara Anggota ASEAN telah mulai menanggapi kebutuhan akan kebijakan yang responsif gender terhadap program dan strategi P/CVE, meskipun sedang dikaji dinamika gender spesifik yang memainkan peran kunci dalam radikalisasi, rekrutmen dan partisipasi.

Beberapa kerangka kerja – seperti RAN Filipina – mengakui pentingnya kontra-narasi dan peran maskulinitas dan femininitas dalam meringkai pengalaman dalam ekstremisme kekerasan. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan bahwa keterlibatan perempuan dan laki-laki dengan konten dan organisasi ekstremis itu sendiri berbeda. Ekstremis kekerasan menggunakan propaganda dan pesan online untuk mendukung pandangan misoginis dan permusuhan terhadap perempuan, menciptakan ketidakamanan di ruang offline, termasuk kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. COVID-19 telah memberikan peluang bagi kelompok ekstremis kekerasan untuk lebih mendukung ujaran kebencian dan sikap permusuhan terhadap perempuan melalui konten online, yang dapat memengaruhi ruang offline dan ketegangan di dalam komunitas.

Peserta diminta untuk merenungkan seberapa efektif kebijakan P/CVE yang peka gender dan responsif gender saat ini, dengan mempertimbangkan kekhawatiran seputar bagaimana ekstremisme kekerasan mempengaruhi perempuan dan laki-laki, sebuah tren

yang jelas tercermin dalam penelitian ini. Dari sampel, 46% responden setuju bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan (P/CVE) yang ada mencerminkan pengalaman beragam perempuan dan laki-laki dalam ekstremisme kekerasan, dengan 46% laki-laki dan 46% perempuan setuju dengan pernyataan tersebut.

Namun, hanya 26% peserta setuju bahwa kebijakan P/CVE yang ada secara memadai menangani kepercayaan yang mendorong permusuhan dan kebencian yang dianut perempuan oleh kelompok ekstremis kekerasan. Faktanya, 50% responden tidak setuju bahwa kebijakan yang ada cukup menangani kepercayaan yang mendorong permusuhan dan kebencian terhadap perempuan, dan 48% yang tidak setuju berasal dari Indonesia.

Seorang yang diwawancarai dari Indonesia mencatat bahwa:

“Sejauh ini di Indonesia, belum ada studi khusus yang menganalisis pengalaman yang beragam dari perspektif masing-masing aktor – perempuan, laki-laki dan pemuda. Dalam kelompok moderat, yang aktif melawan narasi ekstremis, hanya sedikit yang muncul dengan narasi kesetaraan gender melawan yang misoginis. Namun pendekatan mereka masih sangat maskulin sehingga menimbulkan resistensi dan kurang persuasif kepada publik. Apalagi polarisasi semakin kuat antara dua kubu, yakni kubu moderat dan kubu konservatif. Strategi CVE di Indonesia sangat penting, diawali dengan pendekatan pemetaan aktor pemuda, perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, intervensi dirancang lebih spesifik, dan

” implementasinya dirancang sesuai dengan aktornya.”

Yang penting, 90% responden setuju bahwa kepercayaan yang mendorong permusuhan dan kebencian terhadap perempuan yang dianut secara online oleh kelompok ekstremis kekerasan menimbulkan risiko signifikan terhadap keamanan perempuan di dunia nyata.

Peserta dalam survei memberikan rekomendasi yang kuat tentang bagaimana strategi pencegahan atau penanggulangan yang ada dapat lebih mencerminkan pengalaman beragam perempuan dan laki-laki dalam ekstremisme kekerasan, termasuk yang terkait dengan kepercayaan yang mendorong permusuhan dan kebencian terhadap perempuan. Beberapa contoh tersebut antara lain:

“Sebagian besar strategi P/CVE harus melibatkan lebih banyak narasi tentang perempuan yang sebelumnya terlibat dengan organisasi ekstremis, atau mereka yang menerima pesan tentang kepercayaan yang mendorong permusuhan dan kebencian terhadap mereka. Ini harus didukung lebih lanjut oleh para pemimpin di masyarakat dan organisasi yang mendukung perempuan” (peserta dari **Filipina**).

“Kami menilai strategi P/CVE yang ada oleh pemerintah sangat umum dan tidak fokus pada pembangunan perdamaian di akar rumput. Kami percaya bahwa memberdayakan masyarakat, terutama perempuan, untuk berbicara tentang keprihati-

nan mereka, membawa masalah mereka, langsung ke lembaga yang bertanggung jawab, adalah cara bagi kami untuk menjembatani pemerintah dan masyarakat – sehingga mengarah pada perdamaian. Strategi P/CVE saat ini harus dapat mendekatkan program-program pemerintah dengan masyarakat, dan masyarakat harus dapat mengetahui bagaimana mengakses program-program tersebut. Ini akan mengarah pada akuntabilitas yang lebih tinggi bagi lembaga pemerintah, dan mengurangi kerentanan komunitas ini dalam hal direkrut oleh kelompok-kelompok ekstremis yang kejam” (peserta dari **Filipina**).

“Tingkatkan strategi dari sekadar “melawan” menjadi “mengubah”. Melawan bukanlah membangun perdamaian. itu adalah mandat dari pemerintah, tetapi bukan dari para agen perdamaian. Agen perdamaian “mengubah” situasi konflik. Dengan demikian, strategi ini menjadi lebih mencerminkan pengalaman manusiawi kita” (peserta dari **Filipina**).

“Pendekatan PVE harus berbasis keluarga, berbasis konteks dan berbasis lokal, tetapi didukung secara nasional, dengan demikian mengatasi sumber berlapis-lapis yang memungkinkan keluhan, kemiskinan, marginalisasi yang berkelanjutan, dan bahkan

ide-ide diubah menjadi VE. Semacam pendekatan seluruh bangsa. Pendekatan PVE harus secara kritis menghadapi kaitan antara pemberdayaan perempuan dan VE” (peserta dari **Filipina**).

“Ketika kita berbicara tentang P/CVE, kita sering berbicara tentang individu itu sendiri, seperti ketika mereka telah dibebaskan dan direhabilitasi. (Tetapi) penting untuk melihat dampaknya pada keluarga mereka yang lain – area ini tidak banyak disorot. Kami fokus pada rehabilitasi orang yang ditangkap, dan tidak menganggap dampak terbesar sebenarnya pada keluarga mereka yang ditangkap. (Kita perlu) lebih mempertimbangkan anak-anak dan keluarga, serta komunitas individu” (peserta dari **Malaysia**).

“Kampanye media sosial yang efektif dan mudah dipahami dapat memasukkan humor yang dapat diterima dalam budaya lokal, dan dipromosikan oleh warga negara daripada oleh pemerintah, terutama di daerah di mana tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap pemerintah berlaku” (peserta dari **Malaysia**).

“Saya pikir kita benar-benar perlu belajar dari budaya dan komunitas lokal, serta dari geografi. Perempuan di Malaysia berbeda dari satu negara bagian ke negara

bagian lainnya, dari satu tempat ke tempat lain. Dengan mempelajari perbedaan-perbedaan ini kita dapat mengembangkan suatu program atau jalur. Kita harus bekerja dengan para pemimpin agama – kita tidak punya pilihan. Kita juga harus bekerja dengan nasionalis sayap kanan yang perempuannya bahkan mendukung kepercayaan yang mendorong kebencian terhadap sesama perempuan. Strategi yang ada, menurut pendapat saya, tampaknya seperti satu ukuran yang dianggap cocok untuk semua, dan ini sama sekali tidak membantu” (peserta dari **Malaysia**).

“P/CVE harus melihat radikalisasi dan deradikalisasi sebagai ‘pengalaman berdasarkan gender’. Pengalaman berdasarkan gender berarti bahwa laki-laki dan perempuan bergabung, tinggal, dan meninggalkan grup VE secara berbeda. Oleh karena itu, setiap P/CVE harus mengatasi hal ini” (peserta dari **Indonesia**).

Dalam beberapa kerangka kerja yang ada di seluruh kawasan ASEAN, ekstremisme kekerasan tampaknya diintegrasikan ke dalam strategi pencegahan konflik yang lebih luas. Meskipun diakui bahwa ekstremisme kekerasan dapat terjalin dan diperparah oleh konflik internal, radikalisasi juga dapat terjadi selama masa stabil atau bahkan di negara-negara yang biasanya tidak mengalami ketidakstabilan dan konflik internal, yang berarti bahwa seseorang harus berhati-hati dalam menganggap bahwa ekstremisme kekerasan dan terorisme adalah manifestasi khusus dari konflik.

Misalnya, peserta dan orang yang diwawancarai dari Malaysia menyatakan keprihatinan bahwa ada ketegangan yang meningkat di kalangan nasionalis sayap kanan di tengah proses penyusunan RAN Malaysia tentang P/CVE yang mengalami kebuntuan, karena adanya para perempuan dan laki-laki yang menganut kepercayaan yang mendorong kebencian terhadap perempuan. Selain itu, peserta menyatakan keprihatinan bahwa sementara fokusnya masih pada

ekstremisme kekerasan jihadis dan terorisme, negara-negara di kawasan ASEAN masih mengalami ancaman ekstremis dari kecenderungan ideologis lainnya. Ini termasuk kekerasan politik sayap kanan, etno-nasionalis dan komunis di mana kelompok-kelompok menyebarkan dan mendukung ideologi dan norma gender yang berbeda, yang di dalamnya ada partisipasi gender yang bervariasi antara perempuan dan laki-laki. Faktor-faktor ini memiliki implikasi kunci bagi perdamaian dan keamanan.

KEPEMIMPINAN KOLEKTIF DALAM PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN RAN PVE: STUDI KASUS INDONESIA DAN PEMBELAJARAN UNTUK ASEAN

S Studi kami menggunakan Indonesia sebagai studi kasus tentang kepemimpinan kolektif dan bagaimana gender dimasukkan ke dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (selanjutnya disebut RAN P/CVE²⁹) proses perumusan dan implementasi, dan menguraikan beberapa pelajaran yang dipetik dalam kasus Indonesia yang berpotensi dipertimbangkan untuk Negara Anggota ASEAN lainnya. Selama ini Indonesia hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, versi revisi dari Undang-Undang sebelumnya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagai acuan penanggulangan terorisme. Walaupun strategi untuk meminimalkan terorisme sebelum pengembangan RAN P/CVE Indonesia telah dilaksanakan, cakupannya masih terbatas. Selain itu, aktor yang terlibat masih sebatas kementerian dan lembaga penegak hukum/pelaku keamanan. Namun, pengakuan bahwa perempuan juga bisa menjadi pelaku ekstremisme kekerasan, terutama sejak Bom Surabaya 2018, memainkan peran kunci dalam mengubah pendekatan CT menjadi kebijakan yang lebih terintegrasi yang membahas penyebab,

peran aktor dan bagaimana mencegah individu bergabung pada kelompok ekstremis kekerasan.

Karena pengakuan inilah BNPT mengacu pada antara lain UNSCR 2242 (2015) dan memprakarsai penyusunan RAN P/CVE. Tujuannya untuk mencegah munculnya potensi kekerasan ekstrem yang mengarah pada terorisme. Ini menargetkan tidak hanya ekstremis kekerasan yang aktif, tetapi juga dirancang untuk membangun ketahanan masyarakat, termasuk komunitas yang rentan, dan untuk membantu individu dalam mencegah ekstremisme.³⁰ BNPT merumuskan rencana aksi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait dari berbagai kementerian, lembaga dan organisasi masyarakat sipil, dengan menerapkan metode “pendekatan seluruh pemerintah dan seluruh masyarakat”.

Tahap Penyusunan (2017-2020)

Mulai pertengahan tahun 2017, BNPT menyusun RAN P/CVE dengan tim kecil yang terdiri dari praktisi, pakar, dan personel BNPT.³¹ Koordinator tim adalah Bapak Andhika Chrisnayudhanto yang saat ini menjabat sebagai Deputy Kerjasama

Internasional BNPT.³² Kepemimpinannya mencakup pengetahuan diplomatik luas dan komprehensif dalam bidang organisasi regional dan hukum internasional. Kolaborasi yang erat dan partisipasi multi-stakeholder selama berbagai sesi konsultasi dengan BNPT berkontribusi untuk menyempurnakan substansi draft tersebut.³³ Karena BNPT tidak memiliki tidak memiliki divisi yang secara khusus menangani isu gender ataupun perempuan, perwakilan dari organisasi perempuan menyampaikan pandangan mereka dalam berbagai sesi konsultasi. Mereka mencatat kemunduran berikut terhadap pencapaian kemajuan perempuan, antara lain ³⁴:

- 1 Absennya perempuan dalam pembuatan kebijakan P/CVE
- 2 Kurangnya perspektif gender dalam implementasi kebijakan P/CVE di Indonesia
- 3 Isu perempuan sudah lama tidak menjadi bagian penting dari sektor keamanan nasional

Misalnya, Komnas Perempuan menyampaikan empat halaman masukan substantif kepada tim perumus BNPT dalam sesi konsultasi publik dengan UN Women di Jakarta, yang menyatakan bahwa draft RAN P/CVE harus mengacu pada UU No. 18/2014 tentang RAN Indonesia tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Saat Konflik Sosial.³⁵ Para OMS merekomendasikan agar BNPT mempertimbangkan temuan dan perspektif berbasis bukti yang menunjukkan interseksionalitas antara 'keamanan tradisional' dan apa yang dianggap sebagai isu-isu ringan. Sejak 2018, misalnya, Jaringan Aksi Muslim Asia atau

AMAN Indonesia, telah menyarankan sektor keamanan pemerintah untuk belajar dari bom Surabaya untuk memastikan aspek inklusivitas gender dimasukkan dalam RAN.³⁶

BNPT memasukkan umpan balik bahwa pengarusutamaan gender merupakan elemen yang tidak terpisahkan dalam perumusan kebijakan, termasuk yang bertujuan untuk mencegah ekstremisme kekerasan dan memerangi terorisme. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), sebagai salah satu kementerian mitra BNPT, mendapat dukungan kuat dari para OMS untuk mengambil peran yang lebih menonjol dalam membahas rancangan RAN P/CVE, terutama dengan sejarah meningkatnya keterlibatan perempuan dan anak-anak dalam terorisme. Tim BNPT juga memperkuat draft RAN P/CVE melalui pertukaran pandangan dari mitra global seperti UN Women, UNDP, UNODC; dan bertukar pandangan dengan multi-stakeholder lainnya dari berbagai negara di beberapa forum regional.³⁷

Tahap implementasi (sedang berlangsung)

RAN P/CVE ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2021 setelah tiga tahun pembangunan.³⁸ Dalam 113 halaman lampiran Perpres 7/2021,³⁹ RAN P/CVE yang terdiri dari tiga pilar berupaya untuk:

- 1 Meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam mencegah dan melawan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme;
- 2 Meningkatkan partisipasi dan sinergi dalam pelaksana-

naan program RAN P/CVE yang dilaksanakan oleh kementerian, pemerintah daerah, masyarakat sipil dan pihak/stakeholder lainnya;

3

Mengembangkan sistem instrumen pengumpulan dan pemantauan data untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme; dan

4

Meningkatkan kerjasama internasional melalui kerjasama bilateral, regional dan multilateral dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme.

Perpres tersebut merupakan strategi kebijakan yang memiliki dua tujuan. Pertama, memaksimalkan pendekatan moderat yang melibatkan aktor nasional dan lokal non-tradisional, termasuk perempuan, pemuda, dan pemuka agama. Kedua, bertujuan untuk memfasilitasi pengarusutamaan gender dalam mengatasi dan mencegah ekstremisme kekerasan dengan melaksanakan program yang melibatkan aktor lintas kementerian dan lembaga. Prinsip pengarusutamaan gender secara eksplisit disebutkan dalam dokumen akhir yang menjadi pedoman para aktor dalam mengimplementasikan Perpres ini.⁴⁰ Prinsip lain dalam pelaksanaan RAN P/CVE antara lain penghormatan terhadap hak asasi manusia dan tata pemerintahan yang baik. KPPPA berpendapat bahwa peran perempuan dalam terorisme harus dicegah secara kolektif dan, sebagai akibatnya, menyoroti perlunya koordinasi intra-kementerian yang berkelanjutan dengan BNPT.⁴¹ Saat ini, KPPPA dan BNPT terlibat dalam

penguatan koordinasi dalam pelaksanaan RAN P/CVE.

Seseorang yang diwawancarai dari Indonesia merefleksikan proses ini:

“

“Makanya dalam Rencana Aksi Nasional salah satu prinsipnya berpusat pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender... sama halnya dengan rencana aksi daerah. Itu terjadi selama sesi penyusunan. Apa yang terjadi adalah kami menemukan bahwa kami memiliki perasaan yang kuat tentang rencana aksi ini karena kami perlu menerapkannya lebih dari tingkat akar rumput. Jadi, kami datang dengan Rencana Kerja Bali, yang dirancang untuk mempercepat pelaksanaan rencana aksi yang sama. Dengan cara ini ASEAN dapat menyadari pentingnya rencana kerja. Dan ketika kami sedang menyusun/merumuskan rencana itu, kami juga memasukkan, misalnya, ASEAN Committee on Women (ACWC)”.

”

“Makanya kalau melihat Rencana Kerja Bali kata-kata ‘pekerja migran’ masih dalam tanda kurung. Tapi saya pikir itu adalah faktor lain yang muncul. Namun sekali lagi kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa isu buruh migran berperspektif gender. Itulah salah satu faktor yang kami catat dalam sejumlah penelitian. Misalnya, ketika mengerjakan rencana aksi nasional ini dengan Wahid Foundation, mereka melakukan survei yang menyoroti perlunya fokus pada perempuan”.

Hingga saat ini, peningkatan koordinasi antara berbagai lini kementerian koordinator terus membentuk proses implementasi paralel dari RAN P/CVE dan RAN WPS, yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia. Terdapat pembelajaran potensial dari konteks Indonesia terkait dengan perumusan RAN P/CVE Indonesia yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan di masa depan di kawasan ASEAN yang lebih luas. Penelitian kami tentang kasus Indonesia menemukan bahwa:

Kerja tim yang solid, dikombinasikan dengan kepemimpinan yang jelas, memungkinkan proses penyusunan yang sehat dan demokratis. Selain itu, terdapat dorongan diplomatik tingkat tinggi untuk mengatur, mengelola, dan menyesuaikan berbagai masukan ke dalam draft tersebut.

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa komunikasi dan keterlibatan intra-kementerian harus bergerak melampaui “silo/ bekerja sendiri” pada sektor keamanan dan topik-topik “ringan”, seperti pembangunan sosial dan gender.

Perspektif interseksionalitas harus tertanam/tercermin dalam percakapan substantif rancangan, dan harus ada pengakuan dan akomodasi

representasi, suara dan kontribusi para OMS dalam proses penyusunan.

Kolaborasi antara aktor pemerintah dan OMS bukanlah kooptasi. Seluruh proses harus dilembagakan, tetapi partisipasi yang berarti harus dimasukkan selama perumusan RAN P/CVE, yaitu dengan memfasilitasi peluang untuk berdiskusi/debat/dialog tentang konsep-konsep yang krusial yang penting bagi kebijakan P/CVE, seperti reformasi sektor keamanan dan gender.

Menciptakan platform bersama (seperti KHUB Indonesia) sehingga program partisipasi para pemangku kepentingan/program berbasis masyarakat lebih mudah ditampilkan, yang berkontribusi untuk meningkatkan ‘pendekatan seluruh pemerintah dan seluruh masyarakat’.

Multiplikasi prakarsa implementasi RAN P/CVE yang konkret di tingkat lokal, yang menandakan koordinasi multi-level antara lembaga nasional dan lokal, memungkinkan perluasan kepemilikan PVE sebagai agenda bersama menurut komunitas yang terkena dampak VE.⁴²

REKOMENDASI

Dari kajian kami tentang dinamika di kawasan ASEAN, berikut adalah rekomendasi kami:

- 1. Kebijakan P/CVE harus didasarkan pada analisis sensitif gender terhadap penyebab radikalisasi individu yang berubah menjadi ekstremisme kekerasan. Termasuk di dalamnya pengakuan bahwa proses radikalisasi dan pendorong menuju ekstremisme kekerasan dapat berbeda antara perempuan dan laki-laki.**

Dari data survei dan wawancara kami, kekhawatiran umum sering muncul bahwa pembuat kebijakan harus lebih jauh mengakui bahwa proses radikalisasi berbeda untuk perempuan dan laki-laki, meskipun perekrutan dan partisipasi dalam organisasi yang sama. Sederhananya, perbedaan potensial dalam pendorong yang mempengaruhi radikalisasi perempuan dan laki-laki tidak hanya berbeda, tetapi juga sangat gender. Penting juga untuk dicatat bahwa perempuan dan laki-laki tidak dapat diperlakukan secara monolitik, tetapi faktor-faktor yang mendorong laki-laki untuk bergabung dengan kelompok ekstremis kekerasan mungkin tidak menjadi faktor yang sama bagi perempuan.

Meskipun ini mungkin tampak seperti poin yang sangat jelas, model penilaian risiko masih tertinggal dalam memasukkan indikator spesifik gender terkait radikalisasi yang dapat memainkan peran kunci dalam menjelaskan perbedaan mengapa perempuan dan laki-laki bergabung, mempertahankan keterlibatan mereka dan meninggalkan. Yang penting, beberapa kerangka kerja saat ini di seluruh kawasan berurusan dengan ekstremisme kekerasan sebagai manifestasi dari konflik langsung, tetapi proliferasi ekstremisme kekerasan dapat terjadi baik di ruang online dan offline selama masa stabilitas, atau di Negara Anggota ASEAN yang tidak mengalami konflik langsung.

Pearson dkk.⁴³ secara meyakinkan berpendapat bahwa terkait perempuan, kita tidak berbicara mengenai “bahwa mereka harus dijadikan sasaran oleh program-program CVE, melainkan bagaimana inisiatif untuk memasukkan mereka harus dikembangkan”. Hal ini membutuhkan pengakuan relevansi keadaan spesifik lokal untuk memahami bagaimana dan mengapa perempuan mengasosiasikan diri mereka dengan gerakan ekstremis kekerasan, termasuk mengakui perbedaan dalam lingkungan di mana kelompok-kelompok ini ada,

nya, konstruksi norma gender dalam kelompok dapat “berdampak pada kemungkinan kekerasan perempuan diterima sebagai hal yang sah oleh kelompok teroris; peran yang dibayangkan bagi perempuan; pada perilaku yang dinormalisasi untuk laki-laki; dan tentang perlakuan terhadap perempuan sebagai musuh”.⁴⁴

Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan keberadaan ancaman di negara-negara anggota ASEAN dan ideologi organisasi ekstremis serta cara-cara yang mereka tempuh agar dapat menarik perempuan dan laki-laki secara berbeda. Meskipun ekstremisme kekerasan jihadis terus menjadi ancaman abadi di kawasan ASEAN, penting untuk mempertimbangkan ekstremisme kekerasan dan konflik yang ditimbulkan oleh kelompok sayap kanan, etno-nasionalis dan komunis dan strategi masing-masing untuk merekrut dan mempertahankan keterlibatan perempuan dan laki-laki secara berbeda.

Kelompok-kelompok dapat merekrut anggota dan memperluas pengaruh ideologis mereka dengan memprioritaskan

hak-hak laki-laki di atas hak-hak perempuan, dan/atau melalui ideologi gender tertentu yang menarik bagi laki-laki dan perempuan secara berbeda. Penting untuk diakui bahwa meskipun manifestasi kekerasan politik ini berbeda, jalur radikalisme dan kekhawatiran yang dianut negara dapat bersifat serupa. Namun, norma gender dan ideologi gender dalam gerakan ini dapat berbeda dan membingkai partisipasi dan keterlibatan secara berbeda. Misalnya, mendukung agensi perempuan yang lebih besar dalam konflik bersenjata, atau memprioritaskan hak-hak perempuan dan laki-laki dari satu etnis dengan mengorbankan yang lain. Akibatnya, ini harus disesuaikan secara khusus dengan bagaimana norma dan identitas gender dibingkai dalam gerakan dan tidak didekati dengan model “one-size-fits-all”.

Berdasarkan penelitian kami, ketika memikirkan tentang bagaimana memasukkan analisis sensitif gender dari berbagai bentuk ideologis ekstremisme kekerasan (jihadis, etno-nasionalis, sayap kanan dan Marxis) ke dalam kerangka kerja risiko, pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan isu-isu berikut:

DAFTAR PERIKSA SENSITIF GENDER UNTUK PENILAIAN RISIKO EKSTREMISME KEKERASAN

- Apakah ada pandangan misoginis dan seksis terhadap perempuan yang secara aktif dianut dalam ideologi organisasi?
- Jika demikian, apakah ini menempatkan laki-laki pada posisi superioritas atas perempuan?
- Apakah ideologi organisasi membenarkan dan melegitimasi kekerasan, termasuk pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam keadaan tertentu?
- Dengan cara apa hal ini dinormalisasi di antara orang-orang yang terlibat dalam kelompok ekstremis yang kejam?

- Apakah laki-laki membenarkan pandangan misoginis/seksis mereka terhadap perempuan, atau kekerasan terhadap perempuan, dalam konteks ideologi kelompok ekstremis kekerasan?
- Apa peran yang dibenarkan dan dilegitimasi secara ideologis bagi perempuan dan laki-laki dalam organisasi?
- Bagaimana ini dibingkai sehingga dianggap sebagai bentuk “pemberdayaan”, terutama bagi perempuan?
- Apakah ada peluang kepemimpinan, atau peluang yang dapat mendorong mobilitas, bagi perempuan di dalam organisasi yang dapat berfungsi sebagai insentif?

3. Perbedaan dampak terorisme pada perempuan dan anak perempuan harus diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program P/CVE.

Penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan konteks lokal mereka di seluruh kawasan ASEAN dan mengembangkan program yang ditargetkan dan berfokus pada perempuan dan anak perempuan yang secara khusus mencerminkan bagaimana dinamika gender berperan dalam radikalisasi, berhati-hati untuk tidak mengabadikan stereotip gender yang sudah ketinggalan zaman bahwa perempuan selalu menjadi korban atau seseorang menipu mereka untuk bergabung dengan kelompok ekstremis yang kejam. Hal ini terutama terjadi ketika memikirkan pemulangan mantan individu yang secara aktif atau pasif terlibat dengan ISIS, atau tinggal di wilayah pengaruh proto-negara mereka.

Perlu dicermati bahwa perempuan dan anak perempuan dapat menjadi korban, pelaku, pendukung, pemberi pengaruh, dan peserta aktif dalam organisasi teroris, yang memerlukan pemahaman yang

kompleks dan beragam tentang berbagai faktor risiko. Program P/CVE dapat meningkatkan kesadaran publik yang lebih besar tentang bagaimana kelompok ekstremis yang kejam merusak hak dan pemberdayaan perempuan, termasuk cara mereka mendelegitimasi kepemimpinan perempuan yang pada gilirannya memiliki implikasi langsung bagi perdamaian dan keamanan. Secara khusus, program dapat mengekspos bagaimana perempuan direkrut ke kelompok ekstremis kekerasan melalui tawaran pernikahan, melalui tawaran perlindungan dari ancaman atau pengalaman kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, atau melalui janji palsu pemberdayaan.

Seperti disebutkan di atas, ini memiliki implikasi lebih lanjut untuk dinamika online/offline yang menjadi sangat penting selama pandemi COVID-19, ketika peningkatan penggunaan media sosial dan keterlibatan perempuan dalam obrolan dan forum grup – termasuk forum online perempuan – selama tinggal di rumah, himbauan tersebut mengekspos

perempuan pada insentif untuk bergabung dengan organisasi ekstremis yang kejam. Selain itu, pelatihan online mengenai keselamatan yang peka gender dapat direkomendasikan untuk petugas keamanan dan intelijen tentang cara mengidentifikasi sikap seksis yang bermusuhan yang terjadi dalam platform online.

Program P/CVE harus mendukung pengembangan kontra-narasi terhadap ekstremisme kekerasan yang menonjolkan suara perempuan dan pengalaman misogini – termasuk mereka yang sebelumnya terlibat dengan organisasi ekstremis dan yang mempromosikan kesetaraan gender berbeda dengan narasi misoginis. Beberapa peserta yang diidentifikasi dalam penelitian kami menegaskan bahwa organisasi ekstremis kekerasan di seluruh wilayah berusaha untuk mendeligitimasi perempuan sebagai pemimpin. Suara perempuan dan kontra-narasi terhadap ekstremisme kekerasan harus diperkuat oleh para pemimpin di masyarakat, OMS dan pemerintah, termasuk integrasi ke dalam inisiatif dukungan dan rujukan dan pelatihan *e-safety* yang sensitif gender dalam bentuk digital.

Pada saat yang sama, pembuat kebijakan harus mengakui bahwa kontra-narasi juga berpotensi mengorbankan atau menciptakan kerentanan secara tidak langsung bagi perempuan. Pembuat kebijakan dan pemimpin tidak hanya memperkuat suara perempuan dan kontra-narasi, mereka sendiri dan organisasi mereka adalah “model peran” dalam menantang sikap seksis yang bermusuhan.

Seperti yang diamati oleh peserta dari Malaysia, persepsi tentang negara itu penting, dan ketika pembuat kebijakan itu sendiri juga “dianggap misoginis”, hal

itu dapat membentuk dan berdampak negatif pada kebijakan dan praktik P/CVE. Akibatnya, sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk melibatkan para OMS dan kelompok perempuan dalam merancang kontra-narasi ini, karena mereka sering memiliki pengetahuan yang luas dalam memahami keluhan lokal yang dapat menjadi pendorong menuju ekstremisme kekerasan dan menawarkan jalur alternatif di tingkat lokal.

4. Pembuat kebijakan harus mendengarkan dan melibatkan komunitas yang ada di sekitar kelompok-kelompok ekstremis kekerasan.

Penting untuk melibatkan perempuan dan OMS yang sudah berada di garis depan aktivitas ekstremis kekerasan, yang memahami konteks lokal, memiliki kontak lokal dan memahami keluhan nyata dan yang dirasakan di tingkat lokal. PCVE membutuhkan pengetahuan lokal yang mendalam untuk memahami mengapa bias muncul dalam mendefinisikan batas-batas komunitas dan bagaimana hal ini bekerja. Seperti yang disebutkan oleh salah satu peserta, fakta menunjukkan bahwa strategi P/CVE yang ada di seluruh wilayah memang cenderung umum, di mana penelitian kami menemukan kebutuhan untuk lebih spesifik baik dalam hal pengalaman gender perempuan dan laki-laki, dalam berkaitan dengan beragam ideologi ekstremis, serta lingkungan spesifik di mana mereka berada.

Inisiatif dan organisasi pembangunan perdamaian akar rumput dapat memainkan peran kunci dalam ruang P/CVE, dan memberikan kesempatan untuk menjembatani kesenjangan antara pemerintah, pembuat kebijakan, dan masyarakat lokal. Memang, dan seperti yang telah disebutkan, hal ini secara ber-

samaan dapat berkontribusi pada akuntabilitas yang lebih tinggi untuk lembaga dan kementerian pemerintah – termasuk dalam memasukkan pengarusutamaan gender – dan berpotensi mengurangi kerentanan masyarakat yang berisiko.

Hal ini dapat diperluas untuk mencakup fokus khusus pada reformasi dan pelatihan sektor keamanan. Salah satu cara organisasi sektor keamanan melawan seksisme yang memuat sikap permusuhan dan kebencian terhadap perempuan dengan menonjolkan angkatan kerja yang inklusif, menentang impunitas atas kekerasan berbasis gender dan menangani kekerasan dan pelecehan seksual di organisasi mereka sendiri – yang sering menjadikan perempuan dan penganut agama minoritas sebagai sasaran mereka. Masyarakat perlu melihat sektor keamanan yang inklusif dan responsif terhadap keprihatinan dan kebutuhan mereka, dan yang tidak memprovokasi ekstremisme.

5. Perumusan RAN P/CVE bisa sangat terlembaga, tetapi tidak harus kaku. Prosesnya dapat bersifat partisipatif, dengan melibatkan tidak hanya organisasi kementerian tetapi juga para OMS.

Perumusan rencana P/CVE yang memiliki keterkaitan dengan kerangka WPS nasional sangat penting untuk mengatasi

dinamika misogini dan daya tarik ekstremisme kekerasan, terutama sikap seksis dan maskulinitas dan femininitas yang dikonstruksi secara sosial yang memberikan lahan subur bagi radikalisasi menuju kekerasan.

Studi kasus kami tentang penyusunan RAN P/CVE Indonesia, dan implementasi yang sedang berlangsung diharapkan dapat memberikan pelajaran yang dapat membantu pengembangan rencana aksi lainnya di seluruh kawasan. Seperti yang teridentifikasi, multiplisitas inisiatif implementasi RAN P/CVE di tingkat lokal sebagai hasil dari koordinasi multi-level antara lembaga lokal dan nasional memungkinkan perluasan kepemilikan P/CVE sebagai agenda bersama antara pemerintah dan tingkat akar rumput.

Pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa interseksionalitas dan penyertaan perspektif yang beragam dimasukkan dalam penyusunan RAN P/CVE, dan harus ada upaya nyata untuk memastikan pengakuan dan akomodasi terhadap representasi, suara, pengalaman dan kontribusi OMS dalam proses penyusunan. Ini berkontribusi pada partisipasi yang berarti dan memfasilitasi peluang untuk mendiskusikan dan memperdebatkan konsep-konsep kunci, termasuk gender, yang sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan strategi P/CVE dan kebijakan P/CVE yang disesuaikan.

KESIMPULAN

Studi kami memiliki implikasi tidak hanya untuk komitmen Negara Anggota ASEAN yang dibuat dalam konteks Cetak Biru Politik dan Keamanan ASEAN, tetapi juga untuk agenda WPS sebagai bagian dari konsekuensi regional untuk perdamaian dan keamanan. Khususnya terkait dengan dampak terhadap kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam perdamaian dan keamanan; perlindungan inklusif gender dari kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya; dan pencegahan konflik serta peran perempuan dan laki-laki dalam membangun perdamaian.

Misalnya, ekstremisme kekerasan dalam konteks COVID-19, termasuk perekrutan, propaganda dan/atau penyebaran misinformasi dan disinformasi yang membenarkan dan melegitimasi kekerasan terhadap perempuan di seluruh kawasan ASEAN, memiliki implikasi yang jelas bagi WPS, khususnya dalam hal perlindungan yang inklusif gender, sensitif gender, dan responsif gender.

P/CVE harus merespon dan memitigasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang dapat memperburuk kondisi yang kondusif bagi terorisme. Penelitian kami lebih lanjut mengidentifikasi bahwa walaupun perempuan secara aktif berpartisipasi secara online di seluruh wilayah dalam kegiatan ekstremis, kegiatan dan perilaku misoginis di ruang offline, yang diperkuat oleh kelompok ekstremis, berpotensi menghadirkan tantangan ganda yang menjadikan perempuan target sekaligus pelaku kekerasan.

Baik perempuan maupun laki-laki memainkan peran kunci dalam upaya melawan narasi dan kegiatan semacam itu, yang menyerukan pendekatan responsif gender untuk pencegahan konflik dan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan perdamaian, termasuk meningkatkan dan memastikan keterlibatan mereka di tataran akar rumput.

CATATAN AKHIR

1. Johnston M., True, J., Gordon, E., Chilmeran, Y. and Riveros-Morales, Y. (2020), "A Gender Sensitive approach to Empowering Women for Peaceful Communities." Laporan penelitian, Monash Gender, Peace and Security Centre and UN Women, <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/academic-paper-a-gender-sensitive-approach-to-empowering-women-for-peaceful-communities>
2. Contoh-contoh terbaik terbaru: (1) Provinsi Jawa Barat menandatangani rancangan Rencana Aksi Daerah P/CVE yang dibentuk bersama oleh AMAN dan Institut Perempuan dan (2) Penyerahan rancangan "GM dalam Penyusunan RAD P/CVE" kepada BNPT oleh organisasi yang sama.
3. Pearson, E., Winterbotham, E. and Brown, K.E (2020), *Countering Violent Extremism: Making Gender Matter*, Palgrave Macmillan, p.35.
4. Soufan Centre. 2021. *Terrorism and Counterterrorism in Southeast Asia: Emerging Trends and Dynamics*. June, <https://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2021/06/TSC-Report-Terrorism-and-Counterterrorism-in-Southeast-Asia-June-2021.pdf>
5. ASEAN and UN Women. *Pandangan Gender ASEAN: Mencapai SDGs untuk semua dan tidak meninggalkan perempuan atau anak perempuan (2021)* <https://data.unwomen.org/publications/asean-gender-outlook>
6. *Manila Declaration to Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism* (2017), ASEAN, <https://asean.org/storage/2017/09/Manila-Declaration-to-Counter-RRVE-Adopted-by-the-11th-AMMTCI.pdf>
7. *Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security in ASEAN* (2017), https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/8.-ADOPTION_Joint-Statement-on-Promoting-Women-Peace-and-Security-in-ASEANACWC-Endorsed_rev2.pdf
8. *The ASEAN Declaration on Culture of Prevention for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy and Harmonious Society* (2017), ASEAN, <https://asean.org/asean-declaration-on-culture-of-prevention-for-a-peaceful-inclusive-resilient-healthy-and-harmonious-society/>
9. *Joint Statement on Promoting the Women, Peace and Security Agenda at the ASEAN Regional Forum* (2019),
10. *Chairman's Press Statement of the ASEAN Ministerial Dialogue on Strengthening Women's Role for Sustainable Peace and Security* (2020), ASEAN, <https://asean.org/chairmans-press-statement-asean-ministerial-dialogue-strengthening-womens-role-sustainable-peace-security/>
11. Lihat UN Women. 2020. *The First 100 Days of the COVID-19 Outbreak in Asia and the Pacific: A Gender Lens*. <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/the-first-100-days-of-the-covid-19-outbreak-in-asia-and-the-pacific>; Also Monash Gender, Peace and Security Centre. 2020. *Mapping the Impact of COVID-19 on Women, Peace and Security Practitioners in the Indo-Pacific Region I and II*, May and August. https://bridges.monash.edu/articles/report/Mapping_the_Impact_of_COVID-19_in_the_Indo-Pacific_Region_II_Women_peace_and_security_practitioner_views/12936206
12. *Pernyataan Pers Ketua KTT Pemimpin perempuan ASEAN* (2020), ASEAN, <https://asean.org/storage/2020/11/18-Chairman-Press-Statement-ASEAN-Women-Leaders-Summit-final.pdf>
13. *East Asia Summit Leaders' Statement on Women, Peace and Security* (2020), ASEAN, <https://asean.org/storage/2020/11/33-EAS-Leaders-Statement-on-Women-Peace-and-Security-FINAL.pdf>
14. *Studi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan* (2021), ASEAN, https://asean.org/?static_post=asean-regional-study-women-peace-security

15. Johnston M. and True, J. (2019), "Misogyny and Violent Extremism: Implications for Preventing Violent Extremism: Implications for Preventing Violent Extremism." *Research Brief*, Monash Gender, Peace and Security Centre and UN Women, <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/10/misogyny-violent-extremism>
16. ASEAN Regional Study on Women, Peace and Security (2021), ASEAN, https://asean.org/?static_post=asean-regional-study-women-peace-security, p.54
17. Studi Regional ASEAN, hal. 54.
18. Ibid., hal. 54
19. Lihat <https://www.womenandcve.org/about>
20. Studi Regional ASEAN, hal. 54.
21. Lihat UN Women (2019), *Guidance on Implementing Gender Provisions in the Philippine National Action Plan on P/CVE*, <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/07/national-action-plan-untuk-mencegah-dan-melawan-kekerasan-ekstremisme-di-Filipina>
22. Lihat UN Women (2019), *Guidance on Implementing Gender Provisions in the Philippine National Action Plan on P/CVE*, <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/07/national-action-plan-untuk-mencegah-dan-melawan-kekerasan-ekstremisme-di-Filipina>
23. Ibid., hal. 38-39.
24. ASEAN Regional Study on Women, Peace and Security (2021), ASEAN, p. 55, https://asean.org/?static_post=asean-regional-study-women-peace-security
25. Studi Regional ASEAN, hal.53.
26. Lihat Kementerian Dalam Negeri Singapura (2016), Rencana Aksi Kejahatan Dunia Maya Nasional, <https://www.mha.gov.sg/docs/default-source/media-room-doc/ncap-document.pdf>
27. Lihat ABC (2021), "Perempuan ditembak mati setelah melepaskan tembakan ke markas besar kepolisian nasional Indonesia" <https://www.abc.net.au/news/2021-04-01/lone-wolf-woman-shot-dead-jakarta-national-police-hq-terrorist/100042976>
28. Lihat J. True, "Pelaporan kekerasan seksual dan berbasis gender dan terorisme di Asia." *Identitas yang Bertentangan: Perhubungan antara Maskulinitas, Femitas, dan Ekstremisme Kekerasan di Asia*. Bangkok, Thailand: UNDP, 2020, pp. 75-97.
29. Lihat misalnya <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/indonesias-nap-cve-as-an-instrument-of-a-gendered-non-traditional-security-approach-in-indo-pacific/> diakses 8 Februari 2022
30. Lihat BNPT (2018), Rancangan Kebijakan Penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Kekerasan Ekstremisme yang Berujung pada Terorisme, Jakarta: N/A
31. Tim perumus kecil terdiri dari tiga perempuan dan lima laki-laki. Lihat, "Tim Ahli BNPT: RAN P-CVE Akan Menjadi Salah Satu Solusi Mengatasi Terorisme di Indonesia", <https://damailahindonesiaku.com/tim-ahli-bnpt-ran-pe-akan-menjadi-salah-satu-solusi-mengatasi-terorisme-di-indonesia.html> (diakses 8 Februari 2022)
32. Ibid.
33. Lihat, "Laporan Narasi Konsultasi Publik RAN P/CVE" di <https://wahidfoundation.org/index.php/publication/detail/Laporan-Narasi-Konsultasi-Publik-RAN-PE> (diakses 8 Februari 2022); "Mendorong Sinergi untuk Mengendalikan Aksi; Laporan Rapat Koordinasi National and International Knowledge Sharing Forum on Countering Violent Extremism (CVE)" di <https://wahidfoundation.org/index.php/publication/detail/Mendorong-Sinergi-Mengawal-Aksi-Laporan-Rapat-Koordinasi-National-and-International-Knowledge-Sharing-Forum-on-Countering-Violent-Extremism-CVE> (diakses 8 Februari 2022)

34. “Pengkotak-kotakan (*Siloing*)” dalam pembuatan kebijakan dimitigasi dengan penguatan mekanisme koordinasi intra kementerian untuk pelaksanaan RAN PE. Lihat, Gayatri, Irine H, <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/indonesias-nap-cve-as-an-instrument-of-a-gendered-non-traditional-security-approach-in-indo-pacific/> (diakses 8 Februari 2022); juga Eva K Sundari, “Perpres tentang Pemberantasan Ekstremisme Tanpa Perempuan” dalam <https://news.detik.com/kolom/d-5351580/perpres-penanggulangan-ekstremisme-tanpa-perempuan> (diakses 8 Februari 2022)
35. Lihat Komnas Perempuan (2017), “National Women Commission’s notes and feedback for the Drafting of the National Action Plan for the Prevention of Violent Extremism”. Jakarta(DKI Jakarta): N/A.
36. Lihat, Kholifah, Ruby “Gender dan PVE, Apa yang Hilang? Belajar dari Ketahanan Komunitas yang Dipimpin Perempuan di Indonesia” dalam <https://strongcitiesnetwork.org/en/wp-content/uploads/2018/08/Ruby-Kholifah-Presentation.pdf> (diakses pada 8 Februari 2022).
37. Misalnya, BNPT memimpin tim perumus yang terlibat dalam dialog dan sesi berbagi pengalaman, yaitu. selama lokakarya “Melibatkan komunitas dalam pendekatan untuk melawan ekstremisme kekerasan (CVE) dan hasutan di Asia” di Bangkok, Thailand. Lokakarya regional Asia Tenggara dan Asia Selatan ini diikuti oleh pemerintah, pakar internasional, dan perwakilan masyarakat sipil dan sektor swasta. Lokakarya ini disponsori oleh Counter-Terrorism Committee Executive Directors (CTED) dan UN Women, dengan dukungan dari Pemerintah Jepang, pada September 2017.
38. “President issues Presidential Decree on the Prevention and Countermeasures of Extremism” in <https://www.antaraneews.com/berita/1951340/presiden-terbitkan-perpres-pencegahan-dan-penanggulangan-ekstrimisme> (accessed on 8 February 2022).
39. “Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 7/2021 on National Action Plan for Preventing and Countering Violent Extremism that Leads to Terrorism” (for financial years 2020-2024), <https://peraturan.go.id/common/dokumen/terjemah/2021/Perpres%207%202021%20English.pdf> (accessed on 8 February 2022).
40. BNPT mengakui peran fasilitasi UN Women dalam proses penyusunan.
41. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3132/perempuan-dalam-pusaran-terorisme-harus-dicegah-bersama>
42. Contoh-contoh terbaik terbaru: (1) Provinsi Jawa Barat menandatangani rancangan Rencana Aksi Daerah P/CVE yang dibentuk bersama oleh AMAN dan Institut Perempuan dan (2) Penyerahan rancangan “GM dalam Penyusunan RAD P/CVE” kepada BNPT oleh organisasi yang sama.
43. Pearson, E., Winterbotham, E. and Brown, K.E (2020), *Countering Violent Extremism: Menjadikan Gender Penting*, Palgrave Macmillan, hlm. 287.
44. Ibid., hal.35.

